

Dr. Hartuti Purnaweni, MPA



EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Implementasi Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Semarang



EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dr. Hartuti Purnaweni, MPA

**EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK:
Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Penulis : **Dr. Hartuti Purnaweni, MPA**

Sampul & Layout : **Omah Desain**

Cetakan : September 2019

Kode Produksi : **LBP: 09.19.00240**
xi + 124 hlm. 16 x 23 cm.

Penerbit : **LaksBang PRESSindo, Yogyakarta**
(Member of LaksBang Group)
<http://laksbangpressindo.com>
E-mail: laksbangyk@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-5452-68-0

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, karena hanya dengan rahmat dan berkatNya maka buku yang intinya merupakan laporan penelitian ini dapat terselesaikan di tengah-tengah waktu singkat dan dengan begitu banyak jenis pekerjaan yang harus diselesaikan pada waktu yang sama. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, sehingga saran-saran akan kami terima dengan tangan terbuka dan penuh rasa terima kasih.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, khususnya kepada:

1. Dekan beserta para Pembantu Dekan FISIP Universitas Diponegoro
2. Ketua dan Sekretaris Departemen Administrasi Publik FISIP Undip
3. Drs. R. Slamet Santoso, MSi yang menjadi inspirator dan sumber pembelajaran, sekaligus Ketua Kelompok Penelitian Evaluasi Kinerja SKPD Kota Semarang.

4. Almarhum Drs. Rihandoyo, MSi, sesama anggota Kelompok Penelitian Evaluasi Kinerja SKPD Kota Semarang karena bantuannya yang sangat berharga.
5. Ike Soraya, S.Sos, MSi yang sangat membantu pelaksanaan penelitian.
6. Keluarga tersayang, terutama Bapak dan Ibu yang luar biasa, Deisi dan Irzaldi tercinta, saudara-saudara serta teman-teman tersayang, yang sudah memberikan dukungan cinta, kasih sayang, dan pengertian mereka yang mendalam.

Akhir kata, semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para dosen, mahasiswa, pemerintah, maupun pegiat kegiatan keilmuan administrasi publik pada khususnya. Sebagai hasil penelitian tahun 2016, penulis sama sekali tidak mengubah berbagai macam istilah yang hingga diterbitkannya buku ini mungkin sudah berubah. Hal itu untuk menjamin otentisitas hasil penelitian tersebut.

Semarang, September 2019

Penulis

Hartuti Purnaweni

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel	xi
BAB I. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	I
1.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	1
1.2. Evaluasi Kebijakan Publik.....	4
1.3. Standar untuk Melakukan Evaluasi	7
1.4. Mengapa Evaluasi Kebijakan Penting?	8
1.5. Evaluasi Program	9
BAB II SELAYANG PANDANG EVALUASI PERENCANAAN	15
2.1. Pentingnya Perencanaan	16
2.2. Fakta Rencana Kerja/OPD	18
2.3. Perlunya Evaluasi	20
BAB III TINJAUAN TEORETIS	25
3.1. Perencanaan	26
3.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	27
3.3. Evaluasi	29
3.4. Evaluasi Pembangunan Daerah.....	30

3.5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	32
3.6. Pokok-Pokok Telaah Evaluasi di Dinas Pendidikan	36

BAB IV KONDISI UMUM KOTA SEMARANG DAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG. 41

4.1. Gambaran Umum Kota Semarang	41
4.1.1. Kondisi Geografis.....	41
4.1.2. Pemerintahan.....	43
4.1.3. Penduduk	46
4.1.4. Ketenagakerjaan	47
4.1.5. Ekonomi	49
4.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Semarang.....	49
4.2.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Pendidikan.....	49
4.2.2. Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota	50
4.2.3. Telaah Rencana Strategis (Renstra).....	52
4.2.4. Isu-isu Strategis Pendidikan	54
4.2.5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan	55
4.2.6. Potensi Pengembangan	58
4.2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan	60
4.2.8. Perencanaan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.....	62

BAB V EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG 65

5.1. Pokok-Pokok Evaluasi	65
5.1.1. Sinkronisasi Urusan, Program, dan Kegiatan.....	65
5.1.2. Sinkronisasi Indikator Kinerja dan Target Capaian Program	74

5.1.3. Sinkronisasi Lokasi Program dan Kegiatan...	85
5.1.4. Sinkronisasi Dana/Anggaran Program dan Kegiatan.....	86
5.2. Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013	89
5.2.1. Evaluasi Hasil Perencanaan Indikator Makro 90	
5.2.2. Evaluasi Hasil Perencanaan Program Kegiatan.....	95
BAB VI PENUTUP.....	113
6.1. Kesimpulan	113
6.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013	113
6.1.2. Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013.	118
6.2. Saran	120
6.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013	120
6.2.2. Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013.	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123
Peraturan Perundang-Undangan.....	124

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah.....	27
Gambar 3.2. Pedoman Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berdasarkan Renstra SKPD.....	34
Gambar 4.1. Peta Administratif Kota Semarang.....	42
Gambar 4.2. Strategi Pencapaian Visi Misi Kota Semarang.....	45
Gambar 4.3. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Mata Pencarian.....	48

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kriteria Evaluasi Kebijakan William N. Dun.....	6
Tabel 1.2	Indikator Evaluasi Kebijakan.....	7
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2014.....	46
Tabel 4.2	Kuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang 2008-2010	59
Tabel 4.3	Rincian Jumlah dan Status Sekolah di Kota Semarang Tahun 2013	60
Tabel 5.1	Daftar Program dalam Renstra Tahun 2010-2015 dan Renja Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Semarang...	67
Tabel 5.2	Daftar Kegiatan Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015	69
Tabel 5.3	Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Program Dalam Renstra Tahun 2010-2015 dan Renja Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Semarang	76
Tabel 5.4	Perbandingan Pagu Indikatif Dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013	87
Tabel 5.5	Evaluasi Indikator Makro Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013.....	90
Tabel 5.6	Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013.....	96
Tabel 5.7	Evaluasi Program Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013	109

BAB I

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*Public Policy*) mempunyai banyak definisi, di mana salah satunya dikemukakan oleh Easton (1965) melalui model sistem politik, bahwa kebijakan publik merupakan hasil (*output*) dari sebuah sistem politik. Model ini didasarkan pada konsep-konsep *system* yang terdiri *inputs*, *withinputs*, *outputs*, dan *feedback* dan *environment* yaitu kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya) yang ada disekitarnya, di mana kebijakan publik merupakan hasil (*output*) dari sistem politik.

Islamy (2007) dalam kaitannya dengan model Easton menjelaskan bahwa “sistem politik” sebagai sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*),

dukungan-dukungan (*support*) dan sumber-sumber (*resources*) yang semuanya ini adalah masukan-masukan (*inputs*) dan selanjutnya diubah menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan publik yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (*outputs*). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik berfungsi mengubah *inputs* menjadi *outputs*.

Tuntutan-tuntutan (*demands*) timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat sebagai aktor eksternal birokrasi pemerintah maupun internal birokrasi pemerintah, setelah memperoleh respons dari lingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Dukungan (*support*) dan sumber-sumber (*resources*) juga merupakan *inputs*. Kepatuhan dan ketaatan menerima kebijakan publik, mematuhi undang-undang, ketaatan membayar pajak, kemampuan aparat pelaksana, kualitas dan kuantitas aparat, budaya, kondisi sosial ekonomi yang kondusif, ketersediaan sarana, prasarana, dana adalah contoh dukungan dan ketersediaan sumber-sumber. Yang terpenting bagi pembuat kebijakan publik adalah jangan hanya memperhatikan dukungan dan sumberdaya tapi mengabaikan tuntutan. Perhatian terhadap ketiga unsur *inputs* harus dilakukan oleh pembuat kebijakan publik (Islamy, 2007).

Tuntutan-tuntutan, dukungan dan sumber daya selanjutnya dikonversikan (*diproses*) di dalam formulasi kebijakan publik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan (Islamy, 2007). Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam prosesnya melalui berbagai tahapan. Evaluasi kebijakan merupakan salahsatu tahap

dalam proses kebijakan publik. Tahapan Kebijakan public sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (1990) terdiri dari:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah public dan agenda public perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

2) Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah

3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi

dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

1.2. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan menurut Samudra, dkk (1994) dilakukan untuk mengetahui: 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi

untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Tujuan pokok dari evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah sehingga dapat dijadikan sebagai kambing hitam. Evaluasi dilakukan untuk menilai sebab- sebab kegagalan suatu kebijakan yang diterapkan atau mengetahui sejauh mana suatu kebijakan memperoleh dampak yang diinginkan. Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan (Winarno, 2012:229). Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:229) mengungkapkan bahwa evaluasi dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda, yaitu:

Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk memulai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan *standard* atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik (Dunn, 2003:610). Evaluasi kebijakan berkenaan dengan pengukuran mengenai nilai dan manfaat kebijakan. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai- nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target (Dunn, 2003:610). Pengukuran dan penilaian evaluasi sebuah kebijakan memerlukan kriteria atau indikator agar pengukuran atau penilaian yang dilakukan lebih objektif. William N. Dunn (2003:610) menyampaikan enam kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur dalam evaluasi yang meliputi

efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Tabel I.1
Kriteria Evaluasi Kebijakan William N. Dun

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit Biaya Manfaat bersih Rasio Biaya manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hick Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merta dan efisien

Sumber: William N. Dun, 2003

Bridgman dan Davis (2001) mengungkapkan secara umum kinerja kebijakan mengacu pada empat indikator pokok yaitu indikator *input*, *proses*, *outputs* dan *outcomes*.

Tabel 1.2
Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator Evaluasi Kerja	Fokus Penelitian
1	<i>Input</i>	- Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? - Berapakah SDM (sumberdaya manusia), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2	<i>Process</i>	- Bagaimana sebuah kebijakan ditrasnformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? - Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari metode/ cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?
3	<i>Outputs</i>	- Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? - Berapa orang yang berhasil mengikuti program/ kebijakan tersebut?
4	<i>Outcomes</i>	- Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? - Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? - Apakah dampak negatifnya? Seberapa seriuskah?

Sumber: Bridgman dan Davis (2001)

1.3. Standar untuk Melakukan Evaluasi

Kegiatan evaluasi kebijakan sebaiknya mempertimbangkan kerangka evaluasi. Pada dasarnya kerangka evaluasi mencakup empat kategori standar berikut untuk melakukan evaluasi untuk membantu panduan pilihan sepanjang proses:

Utilitas : Siapa yang menginginkan hasil evaluasi dan untuk tujuan apa?

Kelayakan: Apakah prosedur evaluasi praktis, mengingat waktu, sumber daya, dan keahlian tersedia?

Propriety : Apakah evaluasi dilakukan secara adil dan etis?

Akurasi : Apakah pendekatan pada setiap langkah akurat, mengingat kebutuhan pemangku kepentingan dan tujuan evaluasi?

1.4. Mengapa Evaluasi Kebijakan Penting?

Mengembangkan dan menerapkan strategi kebijakan adalah penting dalam mengatasi cedera dan pencegahan kekerasan di tingkat populasi. Meskipun kebijakan telah digunakan secara efektif di beberapa bidang pencegahan cedera dan kekerasan, strategi kebijakan di beberapa daerah tidak memiliki basis bukti yang cukup. Evaluasi kebijakan, seperti semua evaluasi, dapat berfungsi tujuan penting di sepanjang rantai proses kebijakan, termasuk:

- Mendokumentasikan pengembangan kebijakan.
- Mendokumentasikan dan menginformasikan implementasi.
- Menilai dukungan dan kepatuhan terhadap yang ada kebijakan.
- Menunjukkan dampak dan nilai dari suatu kebijakan.
- Menginformasikan basis bukti.
- Menginformasikan kebijakan masa depan.
- Memberikan pertanggungjawaban atas sumber daya yang diinvestasikan

1.5. Evaluasi Program

Ada pendapat bahwa evaluasi kebijakan seringkali disamakan dengan evaluasi program. Secara substansial evaluasi kebijakan dan evaluasi program berbeda walaupun keduanya saling berkaitan dan susah untuk dipisahkan.

Meskipun evaluasi kebijakan dan evaluasi program memiliki banyak kesamaan, ada beberapa yang penting perbedaan juga. Beberapa perbedaan ini meliputi:

- Tingkat analisis yang diperlukan (mis., tingkat sistem atau masyarakat untuk evaluasi kebijakan; tingkat program untuk evaluasi program). Tingkat kontrol dan “batas” yang jelas mungkin lebih menantang dengan evaluasi kebijakan.
- Kemampuan untuk mengidentifikasi komunitas pembandingan yang setara mungkin lebih menantang dengan evaluasi kebijakan. Skala dan ruang lingkup pengumpulan data mungkin lebih besar dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan mungkin memerlukan peningkatan penekanan pada penggunaan data pengawasan dan administrasi.
- Jenis dan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat mungkin berbeda.

Evaluasi program digunakan untuk mengukur efektivitas dari suatu program yang telah diimplementasikan dan faktor-faktor yang dapat menjadi faktor penghambat atau faktor pendorong keberhasilan suatu program. Hasil evaluasi dapat menjelaskan mengapa suatu program dapat berhasil di suatu tempat dan mengalami kegagalan di tempat lain dan dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dari suatu program.

Rossi *et.al* (2004) membedakan evaluasi program menjadi lima tipe yang meliputi:

1) *Assessing the Need for a Program*

Evaluasi kebutuhan adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kebutuhan akan suatu program. *Form a program evaluation perspective, need assessment is theme an sby which an evaluator determines whether there is need for a program and, if so, what program services are most appropriate to that need* (Rossietal, 2004:102). Evaluasi kebutuhan juga digunakan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan memprioritaskan kebutuhan mengenai suatu program. Pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan dan identifikasi sasaran program merupakan hal yang penting untuk membuat desain dan pelaksanaan program yang efektif. Definisi dan informasi yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik dari suatu target merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan suatu program. Konsep mengenai definisi suatu target termasuk risiko populasi, kebutuhan populasi, tuntutan populasi, insiden dan pemerataan serta tarif. Spesifikasi target yang tepat dapat membangun batasan-batasan yang tepat. Rossi *etal* (2004:106) mendeskripsikan langkah-langkah dalam melakukan analisis kebutuhan meliputi:

- Identifikasi pengguna dan kegunaan dari suatu program.
- Mendeskripsikan populasi target dan lingkungan pelaksanaan.
- Identifikasi kebutuhan.
- Mengukur kebutuhan.
- Mengkomunikasikan dengan para pemangku kepentingan.

2) Assessment of Program Theory

Teori dalam suatu program adalah salah satu aspek yang dapat dievaluasi dan penting dievaluasi karena suatu program yang didasarkan oleh teori dan konsep yang lemah memiliki sedikit kemungkinan untuk mencapai hasil yang diharapkan. *The first step in assessing program theory is to articulate it, that is, to produce an explicit description of the conceptions, assumptions, and expectations that constitute the rationale for the program as structured and operated* (Rossi et al, 2004:135). Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan program yang diharapkan dan hal tersebut rasional, bukan program yang sesungguhnya. Komponen yang terdapat dalam deskripsi tersebut meliputi dampak dari teori, rencana pemanfaatan layanan, dan rencana pengorganisasian program. *Assessment of program theory* menjawab dua pertanyaan, yaitu: (1) *how the evaluator explicates and expresses program theory in a form that will be representative of key stakeholders' actual understanding of the program and workable for purposes of evaluation*; (2) *how the evaluator can assess the quality of the program theory that has been thus articulated* (Rossi et al, 2004:135).

3) Assessment of Program Process (or Process Evaluation)

Program process evaluation is a focus on the enacted program itself – its operations, activities, functions, performance, component parts, resources, and so forth ((Rossi et al, 2004:170). *Program process evaluation* dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: (1) *whether a program is reaching the appropriate target population*, and (2) *whether its service delivery and support functions are consistent with program designs, specifications or other appropriate standards* (Rossi et al, 2004:171). *Program process evaluation* terdiri dari bentuk

yang meliputi *process or implementation evaluation and program process monitoring*. *Process or implementation evaluation is typically conducted by evaluation specialist as a separate project that may involve program personnel but is not integrated into their daily routine* (Rossi et al., 2004:175). Terdapat dua aturan utama dalam evaluasi proses, yaitu:

- Evaluasi proses dapat berdiri sendiri sebagai suatu evaluasi program dalam keadaan dimana satu-satunya pertanyaan mengenai integritas operasi program, pelayanan dan persoalan lainnya. Evaluasi proses bisa disebut ketika terdapat pertanyaan mengenai seberapa baik program diorganisasikan, kualitas pelayanan atau seberapa sukses program tersebut mencapai populasi target.
- Melengkapi evaluasi dampak.

4) **Impact Assessment (Impact Evaluation)**

Impact assessment terkadang disebut *impact evaluation or outcome evaluation*. Tujuan evaluasi dampak adalah untuk mengetahui perubahan apa dari hasil intervensi suatu program yang akan dinilai. Evaluasi dampak mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan tercapai dan apakah perubahan yang terjadi termasuk efek lain yang tidak diharapkan. *The major difficulty in assessing the impact of a program is that usually the desired outcomes cannot be achieved because of factors unrelated to the program* (Rossi et al., 2004:58). Perhatian terbesar dari *evaluator* adalah menggunakan beberapa desain evaluasi dampak untuk meminimalkan terjadinya bias dalam memperkirakan efek program. Diantara sumber yang memungkinkan terjadinya bias terutama pada masalah desain *quasi-experimental* yang meliputi bias pilihan, tren dunia, pertentangan program dan kematangan. Menentukan kapan

evaluasi dampak adalah tepat dan apakah desain evaluasi yang digunakan adalah tantangan *evaluator* saat ini. *Impact assessments characteristically very demanding of expertise, time, and are often difficult to set up properly within constraints of routine program operation* (Rossi et al., 2004:59).

5) **Efficiency Assessment**

Efficiency assessments – cost-benefit and cost-effectiveness analyses – provide a frame of reference for relating cost to program results (Rossi et al., 2004: 332). *Efficiency assessment* mencatat hubungan antara biaya dengan program dengan manfaatnya. Analisis *cost-benefit* membandingkan manfaat yang dihasilkan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, sedangkan analisis *cost-effectiveness* membandingkan hasil substantif yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan. *Efficiency assessment* melakukan (1) prospektif selama perencanaan dan tahap desain dari inisiatif (*ex ante efficiency analysis*), dan (2) retrospektif, setelah program berjalan untuk sementara waktu dan ada ketertarikan membuat program permanen atau kemungkinan mengembangkannya (*ex post efficiency analysis*).

BAB II

SELAYANG PANDANG EVALUASI PERENCANAAN

Kekuatan atau kebesaran suatu Negara tidak ditentukan oleh luas wilayah ataupun banyaknya jumlah penduduk, akan tetap ditentukan oleh tingkat kesejahteraan atau kemakmuran yang dicapai rakyatnya (Sitanggang: 1997:12). Kunci keberhasilan Negara-negara maju dapat dipelajari dari perbandingan pemerintahan bahwa Negara-negara yang stabil dan berkembang secara mantap adalah Negara-negara yang pemerintahannya dapat menggunakan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari manajemen pemerintahannya, mengikuti azas dan sistem yang mereka tentukan (dengan baik). Negara-negara seperti Amerika misalnya, perencanaan pembangunan terpadu dengan kekuasaan pemerintahan yang bersifat departemen dan non departemen, Demikian juga di Perancis, Jepang dan Negara-negara lain. Negara dengan sistem yang serupa. Kalaupun personalia dan susunan pemerintahan sangat cepat

pergantiannya, namun karena hal itu terjadi sesuai azas dan sistem yang mereka anut, maka perkembangan kemajuan tetap berjalan secara mantap dan stabil sesuai perencanaan pembangunan negaranya.

Perencanaan merupakan suatu hal yang krusial dalam pelaksanaan pembangunan, sejak mulai awal sebuah kegiatan pembangunan hingga pada pelaksanaan maupun evaluasinya. Kegiatan pembangunan yang dilakukan akan menjadi terarah, karena persiapan hingga pelaksanaannya mempunyai tujuan yang jelas. Perencanaan pada hakekatnya bukan merupakan sebuah kegiatan tunggal saja, akan tetapi merupakan sebuah proses yang dinamis. Perencanaan tidak hanya meliputi pembuatan sebuah dokumen rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek saja, namun lebih merupakan sebuah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan bertahap, dengan hasil akhir yang diharapkan merupakan sebuah pedoman bertindak.

2.1. Pentingnya Perencanaan

Perencanaan yang dibuat pada sebuah kegiatan pembangunan berupa sebuah dokumen tertulis, yang diharapkan bermanfaat akan memberikan dampak yang lebih besar dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga hasil akhir berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dapat tercapai.

Dalam sistem administrasi publik di Indonesia, pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan atau jenjang pemerintahan dan kelembagaan. Berdasarkan berbagai regulasi, era otonomi daerah mensyaratkan bahwasanya pelaksanaan pembangunan daerah

harus didasarkan pada perencanaan pembangunan nasional, antara lain Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan nama yang sama, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga telah menetapkan regulasi operasional terkait dengan pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Terhadap dokumen perencanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil, jadi dalam semua tahapan karena tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan maupun hasilnya. Dengan demikian dapat tercapai tujuan pembangunan nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan pemerintahan. Sesuai dengan fungsi Negara sebagai pemberi pelayanan kepada publik.

Oleh karena perencanaan dilakukan pada berbagai tahap perencanaan, dari pusat hingga ke daerah, maka di tingkat pemerintah daerah evaluasi juga mutlak perlu dilakukan dalam rangka mengetahui apakah pembangunan

daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan. Juga perlu diketahui apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Selain itu manfaat evaluasi adalah memberikan informasi penting bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk membantu mereka dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.

2.2. Fakta Rencana Kerja/OPD

Apakah yang dimaksud dengan Renja (Rencana Kerja) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang saat diterbitkannya buku ini bernama OPD (Organisasi Perangkat Daerah)? Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan pada tingkat SKPD yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Misalnya adalah rencana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, atau Dinas Kesehatan. Masing-masing mempunyai kekhususan tersendiri dalam perencanaan tugasnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Dinas Pendidikan dengan tupoksinya di bidang pendidikan, dan Dinsa Kesehatan dengan tupoksinya di bidang kesehatan. Idealnya adalah masing-masing SKPD menyusun perencanaannya dengan seksama, melalui telaah dan sinkronisasi terhadap beberapa dokumen perencanaan di atas dan yang terkait dengannya, selain melalui proses yang baik dan lengkap, sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan yang benar. Pelaksanaannya sesuai dengan dokumen perencanaan, demikian juga ketika dilakukan evaluasi terhadapnya.

Akan tetapi, faktanya penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah –selanjutnya disebut dengan Evaluasi Renja SKPD– dirasakan masih belum sebagaimana mestinya (Santosa, 2015). Banyak SKPD atau kantor Dinas belum melaksanakan proses evaluasi perencanaan mereka dengan baik, sebagaimana nampak pada beberapa fenomena di lapangan (Santosa, 2015):

- a. Penyusunan Renja SKPD masih bersifat rutin, kurang memperhatikan dinamika dalam regulasi khususnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Padahal, menurut ketentuan tersebut Renja SKPD harus disusun dengan lebih baik sesuai dengan sistematika dan substansi yang telah ditentukan.
- b. Secara lebih ekstrim, Renja SKPD cenderung disusun setiap tahun dengan hanya berdasarkan Renja SKPD tahun sebelumnya namun dengan melakukan sedikit penyesuaian, biasanya dalam jenis kegiatan dan nilai anggaran.
- c. Renja kurang memperhatikan akselerasi pencapaian dokumen lain yang lebih makro yaitu Renstra SKPD dan RPJMD. Renja SKPD belum memiliki keterkaitan yang optimal dengan dokumen Renstra SKPD pada tingkat SKPD, dan dokumen RPJMD pada tingkat Daerah.
- d. Pelaksanaan Renja SKPD masih belum memberikan penekanan khusus pada upaya menjaga keselarasan atau sinkronisasi antar dokumen perencanaan, antara yang berada pada tingkat SKPD maupun pada tingkat Daerah (Kabupaten/Kota).

- e. Hasil Renja SKPD belum memiliki kinerja yang baik, dilihat dari capaian kinerja indikator makro (indikator pembangunan daerah) maupun capaian kinerja indikator mikro (indikator program dan kegiatan) pada setiap tahunnya.
- f. Masih perlu dilakukan perbaikan, misalnya pada ketepatan dan ketersediaan dukungan data pelaporan tahunan, kualitas sumber daya manusia perencana pada unit program setiap SPKD, dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

2.3. Perlunya Evaluasi

Berdasarkan pada beberapa gejala belum optimalnya pelaksanaan evaluasi Renja SKPD tersebut di atas, maka menarik dilakukan evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di daerah sebagai contoh kasus, dalam hal ini SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dengan kegiatan evaluasi, diharapkan sebagai hasilnya akan diperoleh informasi penting sebagai alat membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan di Kota Semarang dalam memahami, mengelola dan memperbaiki hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus berguna untuk memberikan rujukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun-tahun berikutnya, serta mendukung pencapaian visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Kota Semarang. RPJMD Kota Semarang seharusnya diacu oleh semua SKPD yang ada di kota ini agar dapat tercapai tujuan pembangunan yang sudah menjadi kesepakatan.

Dalam evaluasi Renja SKPD ini, analisis dilakukan terhadap kinerja Renja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang, dalam dimensi kebijakan, pelaksanaan dan hasil, sehingga diharapkan akan diperoleh informasi tentang kondisi pelaksanaan evaluasi Renja SKPD di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang.

Dinas Pendidikan merupakan salah satu dari tiga lokasi yang dipilih oleh Kelompok Penelitian Evaluasi Kinerja SKPD Kota Semarang dari Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Lokus pelaksanaan penelitian anggota kelompok yang lain adalah di SKPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, serta di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Deskripsi singkat tentang fenomena permasalahan dalam evaluasi rencana kerja SKPD, adalah perbedaan atau persamaan tentang situasi *das sollen* dan *das sein*, yaitu:

- (1) Bagaimanakah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang tahun 2013?; dan
- (2) Bagaimanakah hasil Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang 2013?

Dengan demikian uraian dalam buku ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi kondisi evaluasi Rencana Kerja di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2013, dan (2) Menyusun usulan peningkatan kinerja evaluasi Rencana Kerja di Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013.

Tujuan ini dicapai dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif antara dokumen rencana dengan dokumen realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Harapannya adalah hasilnya sedikit banyak dapat dijadikan contoh prosedur kajian akademis dalam evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya terkait dengan dimensi perencanaan pembangunan daerah – dalam hal ini Rencana Kerja pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lebih khusus lagi adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Diharapkan akan muncul alternatif solusi guna meningkatkan kualitas evaluasi perencanaan pembangunan daerah, khususnya terkait dengan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga akan lebih muncul dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Harus disadari bahwa terdapat permasalahan terkait hal tersebut, yaitu adanya hal-hal seperti:

- a. Ketersediaan anggaran pembangunan yang relatif terbatas dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan penanganan permasalahan pembangunan yang sangat banyak dan kompleks.
- b. Perubahan pengaturan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan yang sangat dinamis dibandingkan dengan kualitas dan kuantitas pelaksana penyusunan program yang relatif terbatas.
- c. Keterbatasan dukungan sistem pendataan dan informasi daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang tajam dan berkualitas demi pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Namun ini semua harus disikapi sebagai tantangan penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia, sehingga tergantung pada para pelaksana kebijakan dan segenap

pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sebagaimana amanat yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

TINJAUAN TEORETIS

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara telah memberikan banyak pembelajaran tentang pengelolaan terhadap otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah bergerak dari penerapan kewenangan mutlak di tangan pusat (sentralisasi) hingga kewenangan yang diserahkan kepada daerah (desentralisasi). Penyelenggaraan pemerintahan lokal demikian ini sangat tergantung pada pilihan sistem pemerintahan yang digunakan, dari yang sangat otoriter hingga yang liberal.

Penyelenggaraan pemerintahan lokal tentunya sangat dikaitkan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, melalui penyerahan atau pembagian kewenangan pusat kepada daerah, apapun pilihan sistem pemerintahan yang digunakan. Banyak fakta menunjukkan bahwa pilihan pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah akan memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi kemajuan daerah, terlepas masih

adanya kekurangan di sana sini. Desentralisasi akan semakin mengembangkan kepedulian lokal akan masa depannya, menumbuhkan demokratisasi, mendekatkan pelayanan publik, dan tentunya akan semakin memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan daerah tersebut.

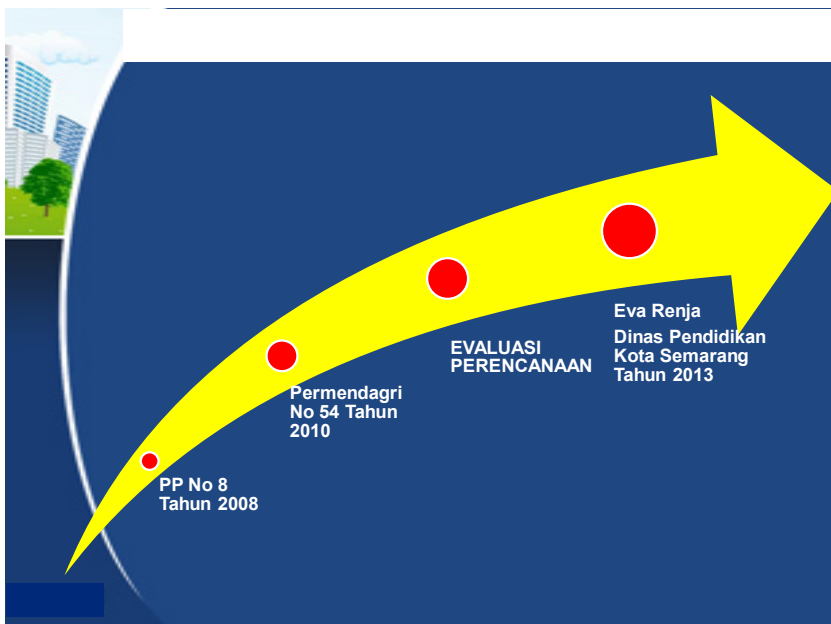
Salah satu intervensi yang diperlukan dalam peningkatan keberhasilan otonomi daerah adalah penerapan kebijakan publik yang tepat bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Kondisi daerah dengan pemerintahannya cenderung berbeda-beda, ada yang sudah maju ada yang masih berkembang; kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kebijakan publik terkait otonomi daerah harus dapat menangkap perbedaan kondisi ini, untuk kemudian memberikan intervensi yang tepat, sehingga setiap daerah tetap dapat menikmati kemajuannya masing-masing.

3.1. Perencanaan

Bentuk kebijakan publik yang sangat berpengaruh pada pembangunan pembangunan daerah adalah kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah. Pada saat ini daerah telah memiliki berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Secara teknis untuk perencanaan pembangunan di daerah telah ditetapkan regulasi operasional, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, kesemua

aturan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, dengan tidak meninggalkan sinergitas pembangunan nasional, sebagaimana tergambar dalam Gambar berikut ini tentang Alur Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Semarang.



Gambar 3.1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2012

3.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Struktur perencanaan

pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai kelengkapannya.

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan karena:

- a. Adanya ketidakpuasan atas persoalan/masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tidak terelakkan, sehingga perencanaan berorientasi pada perubahan/perbaikan yang secara sadar diinginkan
- b. Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki daerah, sementara peruntukan/ kebutuhannya beragam, sehingga perencanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atau optimalisasi pemilikan dan pemanfaatan sumber daya.
- c. Adanya keinginan/tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan berorientasi masa depan.
- d. Adanya keinginan untuk memacu perkembangan sosio-ekonomi dan mengurangi atau menghapus ketidakadilan dan eksternalitas maupun mengoreksi kegagalan/ketidaksempurnaan pasar untuk menjamin kepentingan publik.

3.3. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan dan keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu (1) kriteria/ pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, (2) bukti/ kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan (3) penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian (Sutjipta, 2009).

Lebih lanjut, lima ciri dalam evaluasi adalah (1) kualitas: apakah program baik atau tidak baik, kualitas isi program, kegiatan pendidik, media yang digunakan, penampilan pelaksana program, (2) kesesuaian (*suitability*): pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Program tidak menyulitkan atau membebani masyarakat, sesuai dengan tingkat teknis, sosial dan ekonomis masyarakat, (3) keefektifan: seberapa jauh tujuan tercapai, (4) efisiensi: penggunaan sumber daya dengan baik, dan (5) kegunaan (*importance*): kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam program.

3.4. Evaluasi Pembangunan Daerah

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan dan keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu (1) kriteria/ pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, (2) bukti/ kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan (3) penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian (Sutjipta, 2009).

Lebih lanjut, lima ciri dalam evaluasi adalah (1) kualitas: apakah program baik atau tidak baik, kualitas isi program, kegiatan pendidik, media yang digunakan, penampilan pelaksana program, (2) kesesuaian (*suitability*): pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Program tidak menyulitkan atau membebani masyarakat, sesuai dengan tingkat teknis, sosial dan ekonomis masyarakat,

(3) keefektifan: seberapa jauh tujuan tercapai, (4) efisiensi: penggunaan sumber daya dengan baik, dan (5) kegunaan (*importance*): kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam program

Evaluasi pembangunan dapat dikategorikan sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan program. Evaluasi kebijakan dapat menggunakan tipe atau jenis yang sesuai dengan kebutuhan evaluasi yang diinginkan. Terdapat beberapa jenis atau tipe evaluasi kebijakan, seperti: evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi dampak, evaluasi tujuan, dan sebagainya. Pada saat dilaksanakan evaluasi, ketersediaan data pendukung sangatlah mutlak adanya. Data dibutuhkan paling tidak untuk digunakan memutuskan sejauh mana kinerja dari kebijakan atau program yang dievaluasi.

Model jenis evaluasi tujuan, atau dikenal dengan istilah *Goals Based Evaluation (GBE)* mengandalkan kekuatan tujuan beserta ketersediaan data pada setiap indikator pengukuran yang digunakan. Pemilihan tipe atau jenis evaluasi ini mengingat akan sangat pentingnya peranan tujuan sebagai suatu abstraksi dari berbagai upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Pengendalian dan evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan merupakan langkah strategis agar pelaksanaan program dan kegiatan setiap satuan kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Di samping itu langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dijabarkan dan dilaksanakan secara konsisten, terarah dan fokus melalui program dan kegiatan setiap Satuan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan adanya tindakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran dan target-target pembangunan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahun.

3.5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pengertian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah : dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dua tahapan yang ditempuh adalah:

Tahap I

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) SKPD
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masya-

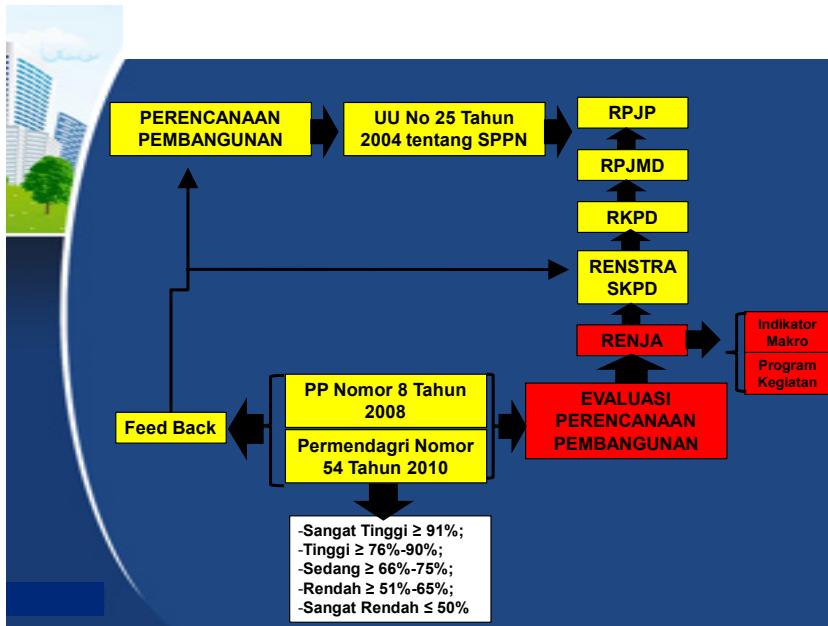
rakat

8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
10. Penyempurnaan rancangan Renja (Rencana Kerja) SKPD
11. Pembahasan forum SKPD; dan

Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.

Landasan Hukum Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



Gambar 3.2. Pedoman Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berdasarkan Renstra SKPD

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2012

- Mengidentifikasi sejauhmana **kemampuan** SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan
 - Mengidentifikasi **realisasi pencapaian target kinerja** program dan kegiatan Renstra SKPD,
 - Mengidentifikasi **hambatan** dan **permasalahan** yang dihadapi.

Tahap II

- Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:
 - Pendahuluan
 - **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**
 - Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan
 - Penutup

Pelaksanaan evaluasi secara sederhana menekankan pada relevansi antara **perencanaan** pembangunan dengan **pelaksanaan** pembangunan. Dasar evaluasi telah diatur dengan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Ruang lingkup evaluasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB tersebut meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah

Evaluasi tersebut dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah, baik RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Uraian di dalam buku ini adalah tentang evaluasi Renja SKPD di Dinas Pendidikan Kota Semarang sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

3.6. Pokok-Pokok Telaah Evaluasi di Dinas Pendidikan

Mengingat berbagai landasan pemikiran di atas, maka dalam analisis mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang, fokusnya ada pada pokok-pokok yang ditelaah di dalam kegiatan evaluasi Renja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang ini, yang dalam istilah penelitian adalah Definisi Konseptual dan Definisi Operasional, yaitu, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Konsep:

Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah penilaian kinerja perencanaan pembangunan yang meliputi aspek kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan.

Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan adalah penilaian kinerja perumusan kebijakan perencanaan tahunan, dengan melihat tingkat konsistensi penyusunan Renja SKPD dikaitkan dengan pedoman penyusunannya (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahunan adalah penilaian kinerja pelaksanaan perencanaan tahunan, dengan melihat tingkat sinkronisasi antar dokumen Renja SKPD dengan dokumen RKPD tahun berkenaan, dalam hal ini adalah Tahun 2013.

Evaluasi Hasil Rencana Tahunan adalah penilaian kinerja hasil perencanaan, dengan melakukan komparasi antara target Renja SKPD dengan realisasi DPA SKPD tahun 2013.

2. Definisi Operasional:

Definisi operasional dalam pelaksanaan Evaluasi Renja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang dibagi dalam *tiga kelompok evaluasi*, sebagai berikut:

- a. Evaluasi Kebijakan Perencanaan, dengan menggunakan indikator berupa pengamatan atas gejala sebagai berikut:
 - Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.
 - Pengolahan data dan informasi.
 - Analisis gambaran pelayanan SKPD kota.
 - Mengkaji hasil evaluasi Renja SKPD kota Semarang tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD kota.
 - Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kota.
 - Penelaahan rancangan awal RKPD kota.
 - Perumusan tujuan dan sasaran.
 - Penelaahan usulan masyarakat.
 - Perumusan kegiatan prioritas.
 - Pelaksanaan forum SKPD kota: a) Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan, b) Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kota, c) Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kota dalam rangka optimalisasi pencapaian

sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan, dan d) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kota sesuai surat edaran walikota.

- Sasaran program dan kegiatan SKPD kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
 - Program dan kegiatan antar SKPD kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kota.
 - Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.
 - **Dokumen Renja SKPD kota yang telah disyahkan, dilaporkan Kepala SKPD Kota kepada Kepala Bappeda Kota.**
 - Kepala Bappeda kota melakukan verifikasi terhadap sinkronisasi rancangan Renja SKPD kota dengan RKPD kota.
 - Kepala Bappeda kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD kota yang telah diverifikasi, diajukan kepada walikota guna memperoleh pengesahan.
- b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana, dengan menggunakan indikator berupa pengamatan atas gejala sebagai berikut:
- Sinkronisasi urusan, program dan kegiatan dalam dokumen Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD.

- Sinkronisasi indikator kinerja dalam dokumen Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD.
 - Sinkronisasi lokasi program dan kegiatan dalam dokumen Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD.
 - Sinkronisasi target capaian program dan kegiatan dalam dokumen Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD.
 - Sinkronisasi dana/anggaran program dan kegiatan dalam dokumen Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD.
- c. Evaluasi Hasil Rencana, dengan menggunakan indikator berupa pengamatan atas gejala sebagai berikut:
- Target kinerja dan anggaran program dan kegiatan pada akhir Renstra dibandingkan dengan realisasi capaian target kinerja dan anggaran program dan kegiatan tahun berkenaan (progress capaian tahunan).
 - Target kinerja dan anggaran program dan kegiatan pada tahun berkenaan (sesuai Renja) dibandingkan dengan realisasi capaian target kinerja dan anggaran program dan kegiatan tahun berkenaan (kinerja capaian tahun berkenaan).
 - Bentuk permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
 - Bentuk penanganan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
 - Efektivitas hasil penanganan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

BAB IV

KONDISI UMUM KOTA SEMARANG DAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Di dalam gambaran umum kondisi Kota Semarang dan Dinas Pendidikan ini diuraikan mengenai kondisi kota Semarang secara umum, dan kemudian diuraikan kondisi Dinas Pendidikan Kota Semarang secara garis besar.

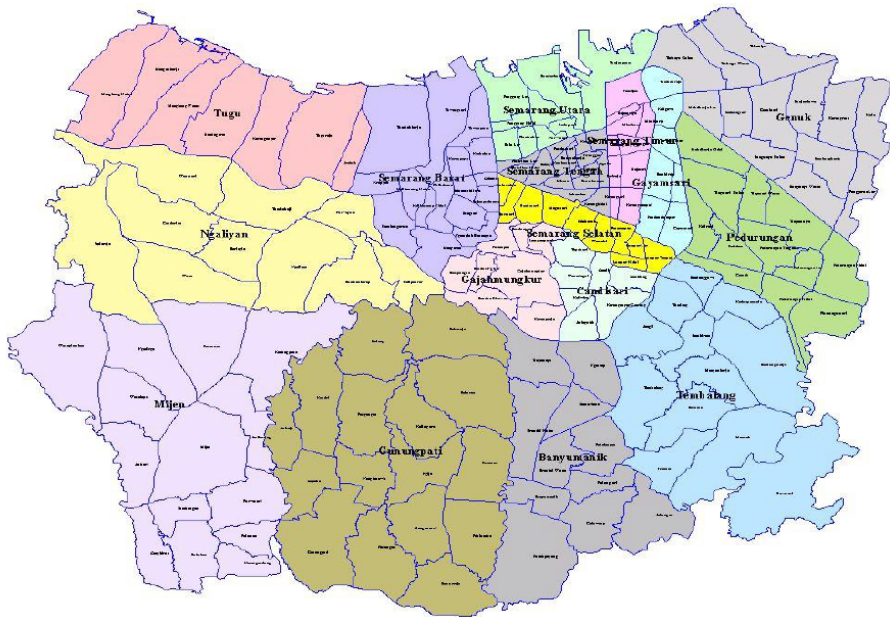
4.1. Gambaran Umum Kota Semarang

4.1.1. Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara

dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Gambar 4.1
Peta Administratif Kota Semarang



Sumber : Kota Semarang dalam Angka 2014

Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1°C pada September ke 24,6°C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9°C ke 32,9°C.

Secara geografis wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah dataran rendah (Kota Bawah) dan daerah perbukitan (Kota Atas). Kota Bawah merupakan pusat

kegiatan pemerintahan, perdagangan dan industri, sedangkan Kota Atas lebih banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan, dan hutan. Luas wilayah Kota Semarang adalah 373,70 km² atau 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Dari luas tersebut 10,59% merupakan tanah sawah dan 89,41% bukan lahan sawah (Kota Semarang dalam Angka 2014)

Secara administratif, Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, Kecamatan Mijen (57,55 km²) dan Kecamatan Gunungpati (54,11 km²) merupakan kecamatan paling luas, dengan sebagian besar wilayah berupa persawahan dan perkebunan. Adapun kecamatan dengan luas terkecil adalah Semarang Selatan (5,93 km²) dan Kecamatan Semarang Tengah (6,14 km²) yang sebagian besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan bisnis, seperti bangunan toko/mall, pasar, perkantoran dan sebagainya.

4.1.2. Pemerintahan

Kota Semarang memiliki visi “*Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera*”, dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas, diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta

menjunjung tinggi supremasi hukum. Penyelenggaraan Pemerintah diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pembangunan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

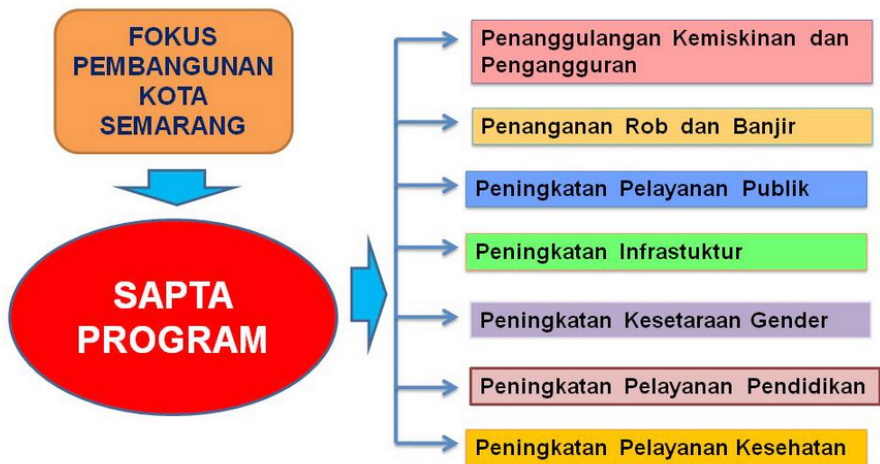
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang

layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kota Semarang memiliki strategi yang diwujudkan dalam Sapta Program, yang di dalamnya terdapat tujuh fokus pembangunan Kota Semarang, sebagaimana pada Gambar 2.2.

Gambar 4.2
Strategi Pencapaian Visi Misi Kota Semarang



Sumber : TKPKD Kota Semarang. 2014. *Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Gerdu Kempling) Tahun 2014*

4.1.3. Penduduk

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2013, jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.572.105 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,83%. Penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 17,57%, sehingga angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara usia produktif dengan penduduk berusia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 39,72%. Ini berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 orang penduduk yang tidak produktif.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan
Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2014

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mijen	29.192	28.695	57.887
2.	Gunung Pati	37.963	37.922	75.885
3.	Banyumanik	64.158	66.336	130.494
4.	Gajah Mungkur	31.859	31.740	63.599
5.	Semarang Selatan	40.758	41.535	82.293
6.	Candisari	39.517	40.189	79.706
7.	Tembalang	74.629	72.935	147.564
8.	Pedurungan	87.441	89.702	177.143
9.	Genuk	46.912	46.527	93.439
10.	Gayamsari	37.254	36.491	73.745
11.	Semarang Timur	38.671	39.951	78.622
12.	Semarang Utara	62.256	65.770	128.026
13.	Semarang Tengah	34.766	36.434	71.200
14.	Semarang Barat	78.970	79.698	158.668
15.	Tugu	15.642	15.637	31.279

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
16.	Ngaliyan	61.188	61.367	122.555
JUMLAH	2013	781.176	790.929	1.572.105
	2012	775.793	783.405	1.559.198
	2011	767.884	776.474	1.544.358

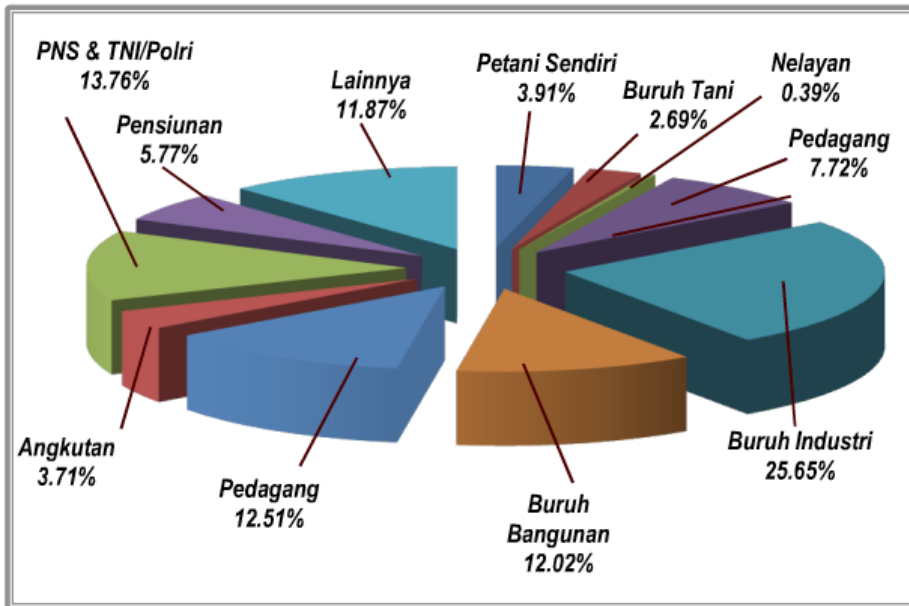
Sumber : Kota Semarang dalam Angka, 2014

Berdasarkan data tersebut, sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, kepadatan penduduk di Kota Semarang cenderung naik. Di sisi yang lain, persebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Tercatat Kecamatan Pedurungan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terpadat, sedangkan Kecamatan Tugu merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah.

4.1.4. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2013, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja sebesar 79,29%. Sedangkan tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2013 adalah sebesar 53,80%. Jumlah pengangguran di Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 226.546 jiwa, yang terdiri dari 125.953 orang laki-laki dan 100.593 orang perempuan. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 71.273 jiwa. Persentase penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut ini :

Gambar 4.3
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Mata
Pencapaian



Sumber : Kota Semarang dalam Angka, 2014

Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa persentase terbesar penduduk Kota Semarang bekerja dengan mata pencapaian sebagai buruh industri (25,65%), disusul kemudian sebagai PNS dan TNI/POLRI (13,76%). Pedagog dan buruh bangunan memiliki persentase sekitar 12%. Paling sedikit adalah penduduk yang memiliki mata pencapaian di bidang angkutan, petani dan buruh tani, serta nelayan yang masing-masing di bawah 5%.

4.1.5. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan. Pada tahun 2012, PDRB Kota Semarang naik menjadi 24.196.487,72. Hal ini menunjukkan bahwa daerah mampu menggali potensi ekonomi yang ada sehingga meningkatkan PDRB dan PAD.

Ada dua sektor yang memiliki sumbangan besar dalam PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor industri pengolahan. Sumbangan sektor hotel, perdagangan, dan restoran sampai dengan tahun 2012 cenderung naik dari 28,01% (tahun 2011) menjadi 28,43% (tahun 2012), dengan laju pertumbuhan sebesar 10,03%. Adapun sektor industri pengolahan menyumbang sebanyak 24,63% (pada tahun 2012), angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 24,36% dengan pertumbuhan sebanyak 13,46%.

4.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Semarang

4.2.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Pendidikan

Permasalahan Pendidikan yang dialami oleh Kota Semarang serupa dengan kota-kota besar lainnya. Hasil identifikasi permasalahan Pendidikan Kota Semarang secara makro menurut data Dinas Pendidikan (2012) adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan dan kesiapan SDM dalam menjalankan kebijakan desentralisasi Pendidikan, meng-

ingat sejak otonomi daerah regulasi Pendidikan terus dan sering berganti.

2. Kurang optimalnya sekolah untuk mengatur sendiri penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan semangat daerah atau kearifan lokal berdasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
3. Ranking kelulusan siswa dibanding daerah lain di Jawa Tengah masih tertinggal, padahal berdasar inputnya lebih baik dari daerah lain di Jawa Tengah.
4. Masih rendahnya pemahaman dan pengalaman pengelolaan keuangan sekolah sesuai regulasi (PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan).
5. Masih sedikitnya sekolah yang bertaraf nasional dan internasional, berdasarkan proporsi jumlah sekolah yang ada di Kota Semarang.
6. Adanya disparitas kualitas sekolah dan pendidik, antara sekolah di tengah kota dengan di wilayah pinggiran kota.
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan Pendidikan.
8. Sebagian sarana dan prasarana sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan dan Standar Nasional Pendidikan.

4.2.2. Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi lima tahun (2010-2015) dari Walikota dan Wakil Walikota Semarang sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang 2010-2015 (2010) adalah *“Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”*.

Untuk mencapai visi tersebut telah dijabarkan dalam 5 Misi yaitu:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum.
3. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang berisi tujuan menjadikan masyarakat Semarang yang sejahtera. Untuk mewujudkannya, salah satunya melalui dukungan misi yang pertama yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas. Misi inilah yang bersentuhan langsung dengan aspek pendidikan, yaitu untuk menciptakan SDM dan masyarakat yang berkualitas tentu dengan melalui pendidikan yang layak dan bermutu.

Agar misi tersebut dapat tercapai, langkah konkrit yang dirumuskan adalah dengan memprioritaskan “Septa Program” yang terdiri dari :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan pengangguran
2. Rob dan banjir
3. Pelayanan publik
4. Tata ruang dan infrastruktur
5. Kesetaraan dan keadilan gender

6. Pendidikan

7. Kesehatan

Dalam Sapta Program tersebut nampak komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas Pendidikan kota Semarang, dengan masuknya Pendidikan sebagai salah satu program prioritas. Salah satu tujuannya adalah memposisikan Kota Semarang sejajar dengan Kota Metropolitan di Indonesia lebih cepat tercapai, dengan meluncurkan slogan **“Waktunya Semarang Setara”**. Dibangun sebuah komitmen dari segenap pemangku kepentingan pendidikan untuk bersama membangun, mengejar ketinggalan dan minimal mensejajarkan pendidikan kota Semarang dengan Kota-kota metropolitan lainnya.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun 2010-2015:

4.2.3. Telaah Rencana Strategis (Renstra)

a. Renstra Kementerian Pendidikan Nasional

Visi Kementerian Pendidikan Nasional pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2014 adalah *“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk membentuk Insan Indonesia Cerdas Kompeten”*. Visi tersebut merupakan visi untuk mencapai rencana pembangunan pendidikan jangka panjang dan merupakan *mile stone* kedua atau tahap lima tahun kedua. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan.
2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan.
3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan.
4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan.
5. Meningkatkan Kepastian/ Keterjaminan memperoleh Layanan Pendidikan.

Melihat misi yang disampaikan dalam Renstra Kemendiknas tersebut kata “layanan pendidikan” menjadi kata kunci dalam setiap misi. Sehingga untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan kota Semarang dengan Pemerintah Pusat, tentu layanan Pendidikan ini akan diadopsi menjadi visi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Sedangkan arah kebijakan lima tahun ke depan Kemendiknas bertumpu pada Peningkatan Mutu, Pendidikan karakter, Penguatan 7TK, pendanaan Pendidikan dan penguatan Pendidikan non forma / informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang.

b. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah, tentu sebagai kota utama yang akan menunjang keberhasilan visi Pendidikan Jawa Tengah. Adapun Visi pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 adalah “*Pendidikan Jawa Tengah Bermoral, Kompetitif dan Cinta Tanah Air*”. Visi ini dijabarkan dalam 5 misi, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara pendidikan.
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Mewujudkan insan pendidikan berkepribadian patriotis.
4. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efektif dan efisien.
5. Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan pendidikan.

4.2.4. Isu-isu Strategis Pendidikan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang kondisi Pendidikan dan analisis yang telah dilakukan, **isu-isu strategis pendidikan di Kota Semarang** meliputi :

1. Akses Pendidikan
 - a. Strategi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah belum berjalan optimal.
 - b. Program sekolah murah berkualitas masih terjadi hambatan dalam implementasinya.
 - c. Akses pelayanan pendidikan non formal belum merata pada seluruh wilayah.
2. Mutu Pendidikan
 - a. Kualitas sarana prasarana sekolah untuk pendidikan dasar masih belum merata di semua wilayah.
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia pendidik masih belum merata.
 - c. Banyak sekolah yang kekurangan tenaga kependidikan.

- d. Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah.
 - e. Relevansi Pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja.
 - f. Penerapan *e-learning* pada pembelajaran di sekolah masih belum optimal.
3. Tata Kelola atau Akuntabilitas
- a. Manajemen sekolah dan Komite sekolah belum berfungsi optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Masih rendahnya pencitraan publik bidang pendidikan.
 - c. Masih banyaknya keluhan pengaduan masyarakat di bidang Pendidikan.
 - d. Kesadaran sekolah dalam mengumpulkan data sekolah dan laporan kegiatan masih belum optimal.
 - e. Belum semua sekolah transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.

4.2.5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Visi dan misi urusan Pendidikan terutama adalah mendukung misi pertama Kota Semarang, yaitu “*Mewujudkan Sumberdaya Manusia Dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas*”.

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi tersebut dan dengan memperhatikan isu-isu strategis pendidikan di Kota Semarang, serta melalui keselarasan dengan visi pendidikan nasional dan visi pendidikan Jawa Tengah, ditetapkanlah Visi Pendidikan **Kota Semarang** yaitu: ***Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berbudaya***”

Perwujudan visi tersebut ber makna bahwa pendidikan sangat penting dalam pengembangan sumberdaya manusia untuk merubah dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan seseorang agar menjadi manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas hanya dapat dicapai apabila pendidikan yang diberikan juga berkualitas. Pendidikan juga bertujuan agar seseorang dalam kehidupan sehari-hari juga harus berbudaya, dalam arti bahwa pengetahuan, kemampuan dan ketrampilannya harus tetap memegang nilai-nilai norma-norma yang ada di masyarakat dan sesuai dengan kearifan lokal. Misalnya, masyarakat Semarang ada dalam pusaran budaya Jawa, sehingga budaya yang seharusnya dijunjung tinggi adalah juga budaya Jawa yang sarat makna.

Secara khusus makna dari penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pendidikan Berkualitas : memiliki nilai lebih dari standar Pendidikan yang ada atau setara dengan Pendidikan kota besar lainnya di Indonesia, serta masyarakat dapat merasakan pelayanan Pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang atau jenis Pendidikan yang dibutuhkannya sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang menguasai imtaq dan iptek.
- (2) Pendidikan Berbudaya: kondisi Pendidikan yang diimplementasikan tetap menjunjung tinggi nilai agama, moral/etika, hukum, dan budaya yang didukung oleh imtaq dan iptek.

Berdasarkan visi di atas, maka untuk mewujudkannya dijabarkan dalam beberapa misi berikut:

- (1) Memperluas pemerataan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh akses Pendidikan.

- (2) Meningkatkan, pemerataan mutu dan relevansi layanan Pendidikan formal dan non formal
- (3) Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Meningkatkan tata kelola Pendidikan secara transparan dan Akuntabel.
- (5) Meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan.
- (6) Memantapkan kerjasama kelembagaan bidang Pendidikan,

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis pendidikan dan permasalahan pembangunan pendidikan di Kota Semarang. Rumusan tujuan renstra Pendidikan ini merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah : (a) Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun; (b) Meningkatkan sarana/prasarana yang memadai; (c) Tenaga pendidikan yang profesional; (d) Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala berstandar nasional.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan Renstra agar secara spesifik dan rasional dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2010-2015) adalah : (a) Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan mencapai 90%; (b) Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional mencapai 40%, SMP/MTs 60%, SMA/SMK/MA 40%, dan Internasional pada masing-masing sekolah I tingkat.

4.2.6. Potensi Pengembangan

a. Sumber Daya

Dapat dikatakan secara umum kondisi urusan pendidikan di Kota Semarang dilihat dari 3P (personil, pembiayaan dan peralatan) dibanding daerah-daerah lain (terutama kabupaten dan kota di Jawa Tengah) relatif lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan : (a) Personil : pendidik dan tenaga kependidikan secara umum yang berkualifikasi SI dan S2 dan telah bersertifikasi telah cukup banyak; (b) Pembiayaan : anggaran pendidikan telah melampaui regulasi yaitu lebih dari 20 persen. (c) Peralatan : sarpras sekolah secara riil banyak yang sudah baik.

Sejak keluarnya regulasi yang menyatakan anggaran Pendidikan minimal harus 20%, maka beban pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang menjadi lebih tinggi. Data yang berhasil diperoleh, pada tahun 2010 Dinas Pendidikan mengelola sekitar 36% dari anggaran APBD Kota Semarang, yaitu sebesar Rp. 691.016.250.400. Dana ini berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.

Tabel 4.2
Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang 2008-2010

TAHUN ANGGARAN		2008	2009	2010
ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN	GAJI	RP	378.726.415.000	539.886.781.400
		% GAJI BANDING ANGGARAN PENDIDIKAN	75%	78%
	ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN DILUAR GAJI & TUNJANGAN	BELANJA LANGSUNG (BL)	90.332.963.000	99.596.315.000
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (BANSOS/ HIBAH)	36.927.526.400	51.533.154.000
		JUMLAH BL+BTL	127.260.489.400	151.129.469.000
		% BTL BANDING ANGGARAN PENDIDIKAN	25%	22%
JUMLAH ANGGARAN PENDIDIKAN		505.986.904.400	551.104.020.000	691.016.250.400
TOTAL APBD KOTA		1.501.549.313.179	1.731.100.342.291	1.898.877.510.618
% ANGGARAN BANDING APBD		34%	32%	36%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2010

b. Jumlah Sekolah dan Status Sekolah

Kota Semarang memiliki 1.713 sekolah termasuk di dalamnya Pendidikan Luar Biasa (PLB). Jumlah tersebut dibagi untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK/RA) sejumlah 720, SD/MI 586, SMP/MTs 206, SMA/MA 95, SMK 88 dan PLB sejumlah 42 Sekolah.

Tabel 4.3.
Rincian Jumlah dan Status Sekolah di Kota Semarang Tahun 2013

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	3	615	618
2	RA	-	102	102
3	SD	347	164	511
4	MI	3	72	75
5	SLB	1	41	42
6	SMP	40	136	176
7	MTs	2	28	30
8	SMA	16	63	79
9	MA	2	14	16
10	SMK	11	77	88

Sumber: Dinas Pendidikan, 2013

4.2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan

Berdasarkan analisis faktor eksternal, Internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan 2010-2015 di Kota Semarang. Tantangan-tantangan dan peluang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Tidak meratanya hasil prestasi pendidikan anak didik di setiap sekolah dan antar wilayah, serta antara sekolah negeri dan swasta.
- b. Penerapan program rintisan wajib belajar 12 tahun belum optimal.
- c. Implementasi program sekolah murah berkualitas pada pendidikan dasar masih banyak hambatan.
- d. Masih banyaknya ruang kelas atau bangunan sekolah yang belum layak.
- e. Faktor tidak meratanya kualitas tenaga pendidik di tiap sekolah, baik disparitas antarasekolah negeri dan swasta serta sekolah di tengah kota dan di wilayah pinggiran kota.
- f. Pendidikan yang diharapkan terutama kejuruan belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja.
- g. Kebutuhan data pendidikan yang *up-to date*, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pendidikan tiap tahunnya.

2. Peluang

- a. Adanya semangat yang kuat dari pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan kinerja pendidikan Kota Semarang.
- b. Adanya semangat dari kalangan masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan, bahkan muncul banyak LSM atau lembaga non-pemerintah yang merelakan diri memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

- c. Adanya MOU antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam pembiayaan pendidikan di daerah.
- d. Masih terdapat peluang-peluang untuk penggalan dana pendidikan yang tidak berasal dari anak didik.
- e. Banyaknya kegiatan Diklat atau BinteK bagi pengembangan tenaga pendidik.
- f. Adanya kemajuan teknologi informasi dalam dunia pendidikan.

4.2.8. Perencanaan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang

Usaha mewujudkan pendidikan yang berkualitas membutuhkan perencanaan pendidikan yang dapat diimplementasikan secara operasional di lapangan. Oleh karena itu maka perencanaan pendidikan harus disertai proyeksi pendidikan ke depan, sehingga dapat menuntut aspek-aspek lain yang erat pengaruhnya terhadap komponen-komponen internal pendidikan. Persoalan-persoalan internal pendidikan mulai dari prasarana, sarana, tenaga pendidik dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas, menjadi tanggungjawab yang harus dipecahkan, khususnya pada era otonomi daerah ketika daerah dituntut mandiri dalam pengelolaan pelayanan publiknya. Dengan demikian urusan pembangunan pendidikan di Kota Semarang menjadi tugas Dinas Pendidikan.

Perencanaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu beberapa dokumen perencanaan baik yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang disusun

Dinas Pendidikan dan menjadi tanggung jawab Sekretariat untuk penyusunannya.

Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari: Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Penerima Anggaran (DPA), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Berbasis Sekolah (RAPBS). Di samping dokumen dimaksud Dinas Pendidikan juga mempunyai tugas membantu menyusun dokumen perencanaan bidang atau urusan Pendidikan untuk dokumen tingkat kota seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Khusus untuk dokumen perencanaan RAPBS menjadi tanggungjawab masing-masing sekolah, namun tetap harus disahkan oleh Dinas Pendidikan.

Perencanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh bagian yang sama, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang didukung oleh 6 (enam) personil, yaitu 1 Kepala Sub Bagian dan 5 (lima) staf. Perencanaan-perencanaan pada Dinas Pendidikan dikoordinir atau ditangani oleh Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Dinas Pendidikan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Pendidikan;
- g. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi.

BAB V

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

5.1. Pokok-Pokok Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan ini menekankan evaluasi pada ada atau tidaknya konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta rencana strategis. Oleh sebab itu, sebagaimana tujuan analisis ini, dilakukan evaluasi terhadap sinkronisasi urusan, program, kegiatan, indikator, target capaian, serta dana program yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2013 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan tahun 2010-2015.

5.1.1. Sinkronisasi Urusan, Program, dan Kegiatan

Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berlaku selama 5 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD setiap tahun, oleh sebab itu mestinya urusan, program, maupun kegiatan yang termuat di dalam Renja SKPD khususnya Dinas Pendidikan selaras dengan urusan, program, maupun kegiatan yang telah direncanakan di dalam Renstra Dinas Pendidikan.

Dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 telah menunjukkan adanya sinkronisasi urusan dengan dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015. Hal ini tidak mengherankan, sebab Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya mengampu urusan wajib bidang pendidikan sehingga seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berfokus pada urusan wajib bidang pendidikan.

Berkaitan dengan sinkronisasi program antara Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dengan dokumen Renja tahun 2013, dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 menunjukkan terdapat 10 program yang tercantum di dalam Renstra, sedangkan di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan nampak terdapat 9 (Sembilan) program yang direncanakan pada tahun 2013. Perbandingan daftar program di dalam kedua dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Daftar Program dalam Renstra Tahun 2010-2015 dan
Renja Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Semarang

No.	Renstra Tahun 2010-2015	No.	Renja Tahun 2013
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (hanya berlangsung hingga tahun 2011)	3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	6.	Program Pendidikan Menengah
7.	Program Pendidikan Menengah	7.	Program Pendidikan Non Formal
8.	Program Pendidikan Non Formal	8.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		

Sumber: Diolah dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa secara umum dokumen Renstra Dinas Pendidikan dengan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 telah memiliki sinkronisasi dalam program yang direncanakan. Meski dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 terdapat 10 program, namun salah satu program yaitu “Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur” hanya direncanakan untuk berlangsung hingga tahun 2011, artinya pada tahun 2013 Renstra Dinas Pendidikan juga memiliki 9 program yang sama dengan dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013. Dihentikannya salah satu program ini disebabkan oleh adanya perubahan regulasi, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang staf bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

“Itu karena kebijakan Walikota mengubah regulasinya. Program peningkatan kapasitas itu semacam pelatihan-pelatihan, diklat dan sebagainya kalau kita biasanya ada pelatihan misalnya Bimbingan Teknis (bintek) ketata usahaan, Bintek Surat Perintah Jalan (SPJ), Keuangan dan sebagainya. Tapi semuanya itu lalu ditarik ke Badan Diklat atau kantor diklat, jadi program itu kalau kita mau melanjutkan kan tidak bisa. Akhirnya ya kita menunggu saja apakah ada pelatihan atau tidak” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Melalui pernyataan tersebut diketahui bahwa dengan adanya perubahan regulasi yang mengharuskan kegiatan di dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur menjadi kewenangan Badan Diklat membuat pelaksanaan program ini hanya berlangsung hingga tahun 2011, oleh sebab itu program ini tidak direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2013. Dari kesembilan program tersebut, diketahui bahwa 3 program diperuntukkan sebagai

kegiatan rutin perkantoran dan 6 program digunakan untuk pelaksanaan pembangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa program-program Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 telah memiliki kesesuaian dengan program yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015.

Adanya kesesuaian program antara kedua dokumen perencanaan milik Dinas Pendidikan yaitu Renstra dan Renja mestinya juga dibarengi oleh adanya sinkronisasi kegiatan dalam kedua dokumen perencanaan tersebut mengingat keduanya memiliki program yang sama.

Untuk membandingkan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dengan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013, berikut ini disajikan Tabel 5.2 yang memuat mengenai daftar kegiatan-kegiatan yang telah di rencanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) serta ada tidaknya kegiatan tersebut dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2013:

Tabel 5.2
Daftar Kegiatan Dalam Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015

No.	Program/Kegiatan Renstra 2010-2015	Kondisi dalam Renja Tahun 2013
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
1.	Pembangunan sarana dan prasana PAUD formal	√
2.	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, Model Pembelajaran, dan Pelaksanaan Ajang Kreatifitas	√
3.	Kegiatan Ujian Kesetaraan Paket A,B,C	√
4.	Sosialisasi Bahaya Merokok	-

No.	Program/Kegiatan Renstra 2010-2015	Kondisi dalam Renja Tahun 2013
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
5.	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD dan SMP	√
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	√
7.	Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas	√
8.	BOS	-
9.	Pendampingan BOS	√
10.	Penjaminan Mutu Sekolah Berstandar Internasional	-
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	√
12.	Lomba-Lomba dan Ajang Kreatifitas	√
13.	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru RSBI SMP	-
3.	Program Pendidikan Menengah	
14.	Pembangunan RKB	√
15.	Rehabilitasi	√
16.	Fasilitasi Pendanaan Pendidikan	√
17.	Penjaminan Mutu Sekolah Menengah	-
18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	√
19.	Lomba-Lomba dan Ajang Kreatifitas	√
20.	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru RSBI SMA	-
4.	Program Pendidikan Non Formal	
21.	Kursus Ketrampilan	√
22.	Desa Vokasi	√
23.	Fasilitasi Akreditasi dan Penilaian Kinerja PNFI dan Pembinaan Kursus Kelembagaan	√
24.	Penyusunan KTSP Pendidikan Kesetaraan	√
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
25.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	√

No.	Program/Kegiatan Renstra 2010-2015	Kondisi dalam Renja Tahun 2013
26.	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	√
27.	Seleksi Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK, SLB	√
28.	Pembinaan Guru TK,SD,SMP,SMA/SMK,SLB	√
29.	Inpassing Jabatan Guru Non PNS (GTY)	√
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
30.	Pengelolaan BOS dan Pendampingan BOS	√
31.	Pengelolaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	√
32.	Fasilitasi Penyelenggaraan UN, UASBN, dan UNPK	√
33.	Lomba Gugus dan Sekolah Sehat	√
34.	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	√
35.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendidikan	√
36.	Monitoring, Akreditasi, dan Ijin Pendirian Sekolah	√
37.	Penyuluhan P4GN Bagi Pelajar SMP, SMA, dan SMK	-
38.	Sertifikasi ISO Untuk Pelayanan Pendidikan	√
39.	Pengelolaan Profil Pendidikan (Padati Web)	√
40.	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik dengan Teknologi Informasi (PPD TI)	√
41.	Manajemen Pendataan Pendidikan	√
42.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan	√

Sumber: Diolah dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 terdapat 42 kegiatan pembangunan dari 6 (enam) program yang direncanakan. Sayangnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2010-2015 tidak mencantumkan kegiatan rutin kantor yang berasal dari 3 (tiga) program rutin yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Oleh sebab itu, analisis untuk sinkronisasi kegiatan Renja dan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013 hanya dapat dilakukan sebatas pada kegiatan pembangunan, karena tidak adanya keterangan di dalam dokumen Renstra mengenai kegiatan rutin yang direncanakan.

Dari Tabel 5.2 juga diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tidak termuat di dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 yaitu Sosialisasi Bahaya Merokok; Penjaminan Mutu Sekolah Berstandar Internasional; Fasilitas Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru RSBI SMP; Penjaminan Mutu Sekolah Menengah; BOS; Fasilitas Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru RSBI SMA; dan Penyuluhan P4GN Bagi Pelajar SMP, SMA, dan SMK.

Dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013 terdapat 53 kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan, meliputi 21 kegiatan rutin kantor dan 32 kegiatan pembangunan. Jika menilik dari jumlah kegiatan pembangunan, memang Renstra Dinas Pendidikan memiliki lebih banyak kegiatan yang direncanakan yaitu sebanyak 42 kegiatan, meski begitu tidak semuanya termuat di dalam Renja tahun 2013.

Realita juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak termuat di dalam Renstra namun direncanakan dalam dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013, seperti DAK, Pengarusutamaan Gender dan PUS, Penyelenggaraan Jambore PNF dan Hari Aksara; Publikasi, Sosialisasi Pendidikan Non Formal dan Fasilitasi Koordinasi dengan Lembaga PNFI; Kegiatan Pelestarian Tuntas Buta Aksara; Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik; Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pengembangan Kepribadian Siswa; dan Pembangunan Sistem APBS dengan Teknologi Informatika.

Perbedaan kegiatan yang ada dalam Renstra maupun Renja salah satunya dikarenakan penyusunan kegiatan Renstra yang dibuat secara global, tidak secara rinci menyebutkan satu persatu jenis kegiatan beserta lokasi kegiatan tersebut. Salah seorang staf Dinas Pendidikan Kota Semarang menerangkan penyebab perbedaan kegiatan dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 sebagai berikut:

“Itu karena satu, pembuatan Renstra kita biasanya “glondhong” (global), tidak mungkin membuat secara rigid misalnya ‘pembangunan SMK 7’, maka pada Renstra bisanya dibuat global sehingga bunyi kegiatannya misal ‘Fasilitasi SMP, Fasilitasi SMA, Pembangunan RKB SMP, Pembangunan RKB SMA’. Kalau dibandingkan dengan kegiatan di DPA, di DPA atau Renja kita glondhong, ke Renstra lebih glondhong lagi. Kedua, kegiatan di Renja itu juga mengikuti RKPD, jadi tergantung RKPD-nya seperti apa dan bagaimana kebijakan Walikota jadi kadang ada beberapa kegiatan yang bertambah di Renja. Contohnya begini, kalau di Renstra kami tulisnya ‘Pengadaan Sarana dan Prasarana’, kalau di Renja jadi ‘Pengadaan Mebelair’” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Keterangan dari staf Dinas Pendidikan Kota Semarang tersebut memperkuat fakta bahwa kegiatan dalam Renstra memang tidak disusun secara terperinci, dengan maksud untuk dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Dinas Pendidikan. Alasan kedua atas ketidaksesuaian kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 dikarenakan pembuatan Renja harus mengacu pada RKPD Kota Semarang serta kebijakan Walikota Semarang sehingga terkadang ada beberapa kegiatan yang harus ditambahkan dalam dokumen Renja meskipun kegiatan tersebut tidak direncanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat sinkronisasi kegiatan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2013 yang ditandai dengan adanya perbedaan jumlah maupun nama kegiatan yang direncanakan dalam Renstra maupun Renja Dinas Pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dokumen Renja dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang telah terdapat sinkronisasi urusan dan program, namun belum terdapat sinkronisasi kegiatan antara dua dokumen perencanaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan yang direncanakan di dalam Renstra namun tidak termuat dalam Renja, begitu pula sebaliknya, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Renja tahun 2013 namun tidak tercermin dalam kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015.

5.1.2. Sinkronisasi Indikator Kinerja dan Target Capaian Program

Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, Dinas Pendidikan mestinya memiliki indikator kinerja serta target yang sama antara Renstra dengan Renja SKPD mengingat bahwa Renja merupakan penjabaran dari Renstra. Sinkronisasi indikator kinerja dan target capaian program ini dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja dan target capaian program pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013.

Sayangnya temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2013 tidak terdapat indikator kinerja pada masing-masing program serta target capaian masing-masing program tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan ini maka sinkronisasi indikator kinerja dan target capaian program dilakukan dengan membandingkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan tahun 2013 sebagai pengganti Rencana Kerja Dinas Pendidikan, dengan pertimbangan bahwa LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013 merupakan salah satu dokumen yang berisi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013. Dengan demikian, idealnya indikator kinerja program dan target capaian program dalam LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013 telah sesuai dengan indikator kinerja yang termuat dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013. Tabel 5.3 berikut ini menunjukkan hasil penelitian atas sinkronisasi indikator kinerja program dan target capaian program:

Tabel 5.3
Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Program Dalam Renstra Tahun 2010-2015 dan Renja Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Semarang

No.	Renstra Tahun 2010-2015		Renja Tahun 2013	
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD	100%	Tidak tercantum	Tidak tercantum
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD	100%	Tidak tercantum	Tidak tercantum
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD	100%	Tidak tercantum	Tidak tercantum
4.	Program Pendidikan Anak Usia Dini			
	Meningkatkan APK PAUD	58%	Meningkatkan APK PAUD sebesar 84%	82%
	Mempertahankan Jumlah TK NBI dan Mendorong Menjadi TK Bertaraf Internasional	1		
	Penerapan Sistem Pembelajaran Berkarater	100%	Penerapan Sistem Pembelajaran Berkarater	100%

No.	Renstra Tahun 2010-2015		Renja Tahun 2013	
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian
5.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
	Mempertahankan APK, APM SD	108,53% 92,20%	Mempertahankan APK, APM SD	108,53% 92,20%
	Mempertahankan APK, APM SMP	111,85% 79,53%	Mempertahankan APK, APM MP	119,05% 82,87%
	Meningkatkan Kualitas Peserta Didik dan Kelulusan SD SMP	99,99% 94%	Meningkatkan Kualitas Peserta Didik dan Kelulusan SD SMP	99,99% 94%
	Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas SD	241 ruang	Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas SD	70 ruang
	Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas SMP	79 ruang	Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas SMP	27 ruang
	Capaian 40% SD Pelaksanaan e-pembelajaran	36%	Capaian 40% SD Pelaksanaan e-pembelajaran	36%
	Capaian 60% Pelaksanaan e-pembelajaran	56%	Capaian 60% Pelaksanaan e-pembelajaran	56%
	Meningkatkan Jumlah Sekolah Terakreditasi 95%	93% 93%		
	Meningkatkan 90% SD dan SMP Terakreditasi Minimal B	86%		

No.	Renstra Tahun 2010-2015		Renja Tahun 2013	
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian
	Mempertahankan Jumlah SD RSBI dan Mendorong Menjadi SBI	1	Mempertahankan Jumlah SD SBI	1
	Mempertahankan Jumlah SMP SBI dan Mendorong Menjadi SBI	4		
6.	Program Pendidikan Menengah			
	Mempertahankan APK SM dan Meningkatkan APM	116,96% 79,97%	Mempertahankan APK dan APM SMA/SMK	116,96% 79,97%
	Meningkatkan Kualitas Peserta Didik dan Kelulusan SMA/SMK 96%	96%	Meningkatkan Kualitas Peserta Didik dan Kelulusan SMA/SMK 96%	96%
	Meningkatkan Jumlah SMA Berakreditasi B sebesar 90%	82%		
	Meningkatkan Jumlah SMK Berakreditasi B sebesar 90%	82%		
	Mempertahankan Jumlah Sekolah SBI atau RSBI SMA dan Mendorong Menjadi SBI	4	Mempertahankan Jumlah Sekolah SBI dan RSBI	4
	Mempertahankan Jumlah Sekolah SBI atau RSBI SMK dan Mendorong Menjadi SBI	4		
	Meningkatkan Jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008	9	Meningkatkan Jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008	9

No.	Renstra Tahun 2010-2015		Renja Tahun 2013	
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian
7.	Program Pendidikan Non Formal			
	Meningkatkan Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi Sebesar 50%	30%	Meningkatkan Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi Sebesar 50%	30%
	Mempertahankan Capaian APK Rata-Rata	114%	Mempertahankan Capaian APK Rata-Rata	114%
	Meningkatkan Lulusan Program Kecakapan Hidup Bersertifikat Kompetensi 20% dan Kecakapan Hidup Bagi Penduduk di Kelurahan/Desa	14%	Meningkatkan Lulusan Program Kecakapan Hidup Bersertifikat Kompetensi 20%	4%
8.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
	Meningkatkan Kualitas Kepala Sekolah dan Pengawas SMA/SMK	100%	Meningkatkan Kualitas Kepala Sekolah dan Pengawas SMA/SMK	100%
	Jumlah Guru SMA/SMK Berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 90%	89,50%	Presentase Guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 90%	89%
	Jumlah Guru SMA/SMK Bersertifikat 90%	71% 67%	Jumlah Guru SMA/SMK Bersertifikat 90%	71% 67%

No.	Renstra Tahun 2010-2015		Renja Tahun 2013	
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian
	Meningkatkan Jumlah SMA Melaksanakannya e-pembelajaran sebesar 60%	52%	Meningkatkan Jumlah SMA Melaksanakannya e-pembelajaran sebesar 60%	52%
	Meningkatkan Jumlah SMK Melaksanakannya e-pembelajaran sebesar 65%	57%	Meningkatkan Jumlah SMK Melaksanakannya e-pembelajaran sebesar 60%	57%
	Kualifikasi S-1 80% Pendidik TK, Kualifikasi Pendidik PAUD Nonformal 70% Telah Dilatih	56% 62%	Kualifikasi S-1 80% Pendidik TK, Kualifikasi Pendidik PAUD Nonformal 70% Telah Dilatih	56% 62%
	Meningkatkan Presentase Guru Berkualifikasi S-1 88% dan 98%	87% 91%	Meningkatkan Presentase Guru Berkualifikasi S-1 88% dan 98%	87% 91%
	Meningkatnya Guru Bersertifikat	57% 67%	Meningkatnya Guru Bersertifikasi Sebesar 90%	57% 67%
	Meningkatkan Kualitas Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP	100%		
	Mempertahankan Rasio Pendidik dan Peserta Didik	1: 20	Mempertahankan Rasio Pendidik dan Peserta Didik	1: 20
	Mempertahankan Rasio Pendidik dan Peserta Didik	1: 14		

No.	Renstra Tahun 2010-2015		Renja Tahun 2013	
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian
9.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pendidikan	80%	Meningkatkan Jumlah Sekolah Terakreditasi 95%	93%
			Meningkatkan 90% SD dan SMP Terakreditasi Minimal B	86%
			Meningkatkan Jumlah SMA Berakreditasi B sebesar 90%	82%
			Meningkatkan Jumlah SMK Berakreditasi B sebesar 90%	82%
			Meningkatnya penyediaan data dan informasi Bidang Pendidikan	80%

Sumber: Diolah dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Tabel 5.3 menunjukkan daftar indikator kinerja program dan target capaian program tahun 2013 yang berasal dari Renstra dan Renja Dinas Pendidikan yang digantikan oleh LAKIP karena pada dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 tidak dicantumkan indikator kinerja program serta target capaian program. Meski dokumen LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013 telah mencantumkan indikator kinerja dan target capaian program, sangat disayangkan indikator kinerja dan target capaian tersebut tidak disusun berdasarkan program melainkan berdasarkan sasaran, sehingga memiliki susunan yang berbeda dengan indikator kinerja dan target capaian program yang tercantum dalam Renstra. Selain itu, dalam dokumen LAKIP Dinas Pendidikan maupun Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 tidak dicantumkan indikator kinerja maupun target capaian kinerja program untuk 3 (tiga) macam program rutin yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sehingga indikator kinerja dan target capaian kinerja ketiga program tersebut tidak dapat dibandingkan.

Lebih jauh, Tabel 5.3 juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa program di Renstra yang pada kenyataannya memiliki indikator kinerja program yang tidak sama dengan indikator kinerja program dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 yang pelaksanaannya tercermin melalui LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013. Program Pendidikan Anak Usia Dini memiliki tiga buah indikator kinerja program dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 namun hanya memiliki dua indikator dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013. Adapun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

justru hanya memiliki satu indikator dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 namun memiliki lima indikator dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013.

Berkaitan dengan adanya perbedaan indikator yang mencolok pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, salah seorang staf Dinas Pendidikan memberikan keterangan bahwa:

“Karena kalau di Renstra kita mengikuti format yang di pusat dari Jakarta dan dulu belum ada manajemen pelayanan pendidikan yang format dari pusat, Kementerian Pendidikan tidak memiliki Program Manajemen Pelayanan Pendidikan karena mereka semua kegiatannya misal akreditasi SMA itu ya dimasukkan dalam Program Pendidikan Menengah bukan di Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, kalau yang SMP masuknya di Program Pendidikan Dasar, makanya ketika sudah jadi LAKIP dan LKPJ yang betul sebenarnya justru yang indikatornya banyak ini karena sudah kita sesuaikan dengan programnya, jadi program untuk akreditasi itu kita masukkan dalam Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tapi indikatornya kita punya hanya saja tidak kita pasang di Renstra. Kalau di Renja dan LKPJ kita menulisnya sesuai dengan kegiatan yang ada disini, biasanya Manajemen Pelayanan Pendidikan itu isisnya akreditasi” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Perbedaan indikator kinerja program khususnya pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan disebabkan oleh adanya perbedaan format perencanaan di tingkat Dinas Pendidikan Kota Semarang dan format Kementerian Pendidikan yang dulunya tidak memiliki Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Jika dicermati lebih jauh, memang beberapa indikator kinerja program, utamanya yang berkaitan dengan akreditasi, pada Renstra dicantumkan dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

dan Program Pendidikan Menengah. Akan tetapi indikator kinerja ‘Meningkatkan Kualitas Manajemen Pendidikan’ hanya tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015, dan tidak dimuat dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013. Sementara itu, indikator ‘Meningkatnya penyediaan data dan informasi Bidang Pendidikan’ juga hanya tercantum dalam Renja Dinas Pendidikan, tidak termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015.

Tidak hanya itu, perbedaan indikator kinerja program antara kedua dokumen tersebut juga terlihat dari indikator dalam Program Pendidikan Menengah yang pada Renstra terdapat dua indikator yaitu ‘Mempertahankan Jumlah Sekolah SBI atau RSBI SMA dan Mendorong Menjadi SBI’ serta ‘Mempertahankan Jumlah Sekolah SBI atau RSBI SMK dan Mendorong Menjadi SBI’. Dalam Renja tahun 2013, kedua jenis kegiatan tersebut tidak disebutkan secara rinci, hanya tercantum sebagai ‘Mempertahankan Jumlah Sekolah SBI dan RSBI’.

Selain adanya perbedaan indikator kinerja program dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013. Tabel 4.3 juga menunjukkan adanya perbedaan target capaian kinerja pada beberapa program dalam kedua dokumen perencanaan tersebut. Indikator ‘Meningkatkan APK PAUD’ pada Renstra Dinas Pendidikan memiliki target capaian kinerja sebesar 58% sedangkan dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 memiliki target capaian kinerja sebesar 82%. Selain itu, indikator ‘Mempertahankan APK, APM SMP’ juga memiliki target capaian kinerja yang berbeda, dalam Renstra target tahun 2013 tertulis sebesar 111,85% dan 79,53% sedangkan dalam Renja tahun 2013 tertulis sebesar 119,05% dan 82,87%, begitu pula dengan beberapa indikator kinerja program lainnya.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator kinerja program serta target capaian kinerja program Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 tidak memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja program serta target capaian kinerja program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2013 yang ditandai dengan adanya perbedaan indikator kinerja program dalam maupun adanya perbedaan target capaian kinerja program dalam indikator yang sama dari kedua dokumen perencanaan tersebut.

5.1.3. Sinkronisasi Lokasi Program dan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dengan melihat Sinkronisasi lokasi program maupun kegiatan tidak dapat dilakukan sebab dalam dokumen Renstra, proyeksi perencanaan selama 5 tahun dibuat secara umum dan belum secara spesifik merujuk pada lokasi tertentu. Selain itu, kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Renstra dibuat secara umum, tidak secara terinci sebagaimana yang ada dalam Renja sehingga sering kali terdapat perbedaan antara kegiatan yang ada direncanakan dalam dokumen Renstra dengan dokumen Renja sebagaimana bahasan dalam 5.1.1 mengenai sinkronisasi urusan, program, dan kegiatan. Lokasi program-pun tidak dapat dideteksi pada dokumen Renstra, sebab Renstra memuat garis besar program yang akan dilakukan, namun rincian lokasi secara spesifik dijabarkan setiap tahun melalui Renja, oleh sebab itu dalam Renstra tidak tercantum lokasi program. Maka dari itu, evaluasi terhadap sinkronisasi lokasi program dan kegiatan tidak dapat dilakukan.

5.1.4. Sinkronisasi Dana/Anggaran Program dan Kegiatan

Prinsip perencanaan yang ideal tidak hanya menuntut adanya sinkronisasi urusan, program, kegiatan serta indikator kinerja dan target capaian kinerja program, namun juga mengharuskan adanya sinkronisasi anggaran bagi program yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013. Sinkronisasi kegiatan tidak memungkinkan dilakukan dalam analisis ini karena terlalu banyaknya kegiatan yang harus ditelaah.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai sinkronisasi dana/anggaran program dalam kedua dokumen perencanaan tersebut, berikut ini Tabel Perbandingan Pagu Indikatif Dalam Renstra Tahun 2010-2015 dan Renja Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Semarang:

Tabel 5.4
Perbandingan Pagu Indikatif Dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

No.	Program	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Pagu Indikatif Renja (Rp)	Selisih Pagu Indikatif (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.972.065.081	10.022.503.000	949.562.081
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.435.968.300	411.690.000	1.024.278.300
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	173.524.377	147.364.758	26.159.619
4.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	144.429.419	141.391.919	3.037.500
5.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	166.684.214.732	117.432.117.081	49.252.097.651
6.	Program Pendidikan Menengah	8.206.368.838	17.825.382.799	9.619.013.961
7.	Program Pendidikan Non Formal	645.934.756	758.113.756	112.179.000
8.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	751.522.569	869.687.000	118.164.431
9.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.261.236.240	3.863.813.000	397.424.240
Jumlah		194.275.264.312	151.472.064.313	41.804.200.999

Sumber: Diolah dari Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa pagu indikatif untuk kesembilan program dalam Renstra lebih banyak dibandingkan pagu indikatif yang direncanakan dalam Renja tahun 2013. Sebagian besar program dianggarkan dengan pagu indikatif lebih banyak di Renstra dibandingkan di Renja, hanya terdapat 3 program dalam Renja yang memiliki pagu indikatif lebih besar dari pagu indikatif yang direncanakan di Renstra yaitu Program Pendidikan Menengah yang pada Renstra memiliki pagu indikatif sebesar Rp. 8.206.368.838,-, nyatanya memiliki pagu indikatif lebih besar di Renja dengan jumlah Rp.17.825.382.799,-; Program Pendidikan Non Formal yang memiliki pagu indikatif Rp.645.934.756,- pada Renstra dengan pagu indikatif yang lebih tinggi di Renja dengan jumlah Rp.758.113.756,-; serta Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki pagu indikatif di Renstra sebesar Rp.751.522.569,- dan pagu indikatif di Renja sebesar Rp. 869.687.000,-.

Berdasarkan Tabel 5.4 tersebut juga diketahui bahwa selisih pagu indikatif Renstra dan Renja Dinas Pendidikan tersebut sangat besar hingga mencapai Rp.41.804.200.999,-. Program dengan selisih pagu indikatif terbesar yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan selisih Rp.49.252.097.651,- sedangkan Program dengan selisih pagu indikatif terkecil yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan selisih hanya Rp.3.037.500,-. Adanya perbedaan pagu indikatif yang sangat besar ini dijelaskan oleh staf Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

“Kalau di Renstra kita kan menggunakan basic awal tahun 2010, kita estimasinya anggaran naik-naik teruskan misalkan sebesar 5-10%, tapi kondisi kekinian itukan berbeda. Kita juga tergantung PAD-nya berapa, Bantuan Keuangannya berapa, dan sebagainya. Jadi

kalau kita ditanya anggarannya berapa, ya kita tanyakan kembali mampunya berapa. Kalau di Renstrakan memang basicnya tahun 2010, jadi pasti akan berbeda. Kalau ada yang sama anggarannya antara Renja dan Renstra malah saya jadi merasa aneh” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Berdasarkan keterangan staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 yang dilakukan pada tahun 2009 tentu dibuat berdasarkan kondisi pada awal tahun 2010 dengan estimasi kenaikan anggaran pertahunnya, namun Renja tahun 2013 dibuat pada tahun 2012 sehingga Renja lebih mampu mengikuti serta menyesuaikan kondisi kekinian seperti perolehan PAD maupun Bantuan Keuangan yang diterima. Oleh sebab itu kedua dokumen perencanaan tersebut memiliki pagu indikatif yang berbeda.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2013 tidak terdapat sinkronisasi anggaran yang ditandai dengan adanya selisih pagu indikatif yang sangat besar dari program-program yang direncanakan dalam kedua dokumen perencanaan tersebut.

5.2. Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013 terdiri dari dua aspek evaluasi yaitu, (1) evaluasi hasil perencanaan indikator makro; dan (2) evaluasi hasil perencanaan program dan kegiatan yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

5.2.1. Evaluasi Hasil Perencanaan Indikator Makro

Evaluasi hasil perencanaan indikator makro merupakan evaluasi terhadap target dan realisasi capaian kinerja yang dilihat dari program dan indikator pada urusan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2013 yaitu urusan pendidikan, selengkapannya tersaji pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 5.5
Evaluasi Indikator Makro Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Tahun 2013

No	Program Dan Indikator Kinerja Program	Target Renja 2013	Capaian 2013	Capaian Kinerja	Kategori
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini			82,93%	Tinggi
	Meningkatkan APK PAUD	82	54	65,85%	Sedang
	Penerapan Sistem Pembelajaran Berkarakter	100	100	100%	Sangat Tinggi
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			98,01%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan APK SD	108,53	107,38	98,94%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan APM SD	92,20	92,26	100,06%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan APK SMP	119,05	117,15	98,40%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan APM SMP	82,87	80,61	96,79%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Kualitas Peserta Didik dan Kelulusan SD 99,99%	99%	99%	100%	Sangat Tinggi

No	Program Dan Indikator Kinerja Program	Target Renja 2013	Capaian 2013	Capaian Kinerja	Kategori
	Meningkatkan Kualitas Peserta Didik dan Kelulusan SMP 94%	94%	94%	100%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas SD	70 Ruang	113 Ruang	161,43%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas SMP	27 Ruang	11 Ruang	40,74%	Sangat Rendah
	Capaian 40% SD Pelaksanaan e-pembelajaran	36	30	83,33%	Tinggi
	Capaian 60% SMP Pelaksanaan e-pembelajaran	56	54	96,43%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan Jumlah SD RSBI dan Mendorong Menjadi SBI	1	0	100%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan Jumlah SMP RSBI dan Mendorong Menjadi SBI	4	0	100%	Sangat Tinggi
3	Program Pendidikan Menengah			107,43%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan APK SM 116,96%	116,96	119,96	102,56%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan APM SM 79,97%	79,97	89,61	112,05%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Kualitas Peserta Didik dan Kelulusan SMA/ SMK 96%	96	99,84	104%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Jumlah 11 SMK Ber ISO 9001:2008	9	10	111,11%	Sangat Tinggi
4	Program Pendidikan Non Formal			116,67%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Bersertifikasi Sebesar 50%	30	30	100%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan Capaian APK Rata-rata	114	114,79	100,69%	Sangat Tinggi

No	Program Dan Indikator Kinerja Program	Target Renja 2013	Capaian 2013	Capaian Kinerja	Kategori
	Meningkatkan Lulusan Program Kecakapan Hidup Bersertifikat Kompetensi 20% dan Kecakapan Hidup Bagi Penduduk di Kelurahan/Desa	4	10	250%	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			106,76%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Kualitas Kepala Sekolah dan Pengawas SMA/SMK	100	100	100%	Sangat Tinggi
	Presentase Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4	87	64,93	74,63%	Sedang
	Presentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4	91	89	97,80%	Sangat Tinggi
	Jumlah Guru SMA/SMK Berkualifikasi S-1/D-4 Sebesar 90%	89	85	95,51%	Sangat Tinggi
	Jumlah Guru SMA Bersertifikat 90%	71	98,90	139,29%	Sangat Tinggi
	Jumlah Guru SMK Bersertifikat 90%	67	98,43	146,91%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Jumlah SMA Melaksanakan e-pembelajaran Sebesar 60%	52	40	76,92%	Tinggi
	Meningkatkan Jumlah SMK Melaksanakan e-pembelajaran Sebesar 60%	57	50	87,72%	Tinggi
	Kualifikasi S-1 80% Pendidik TK	56	60	107,14%	Sangat Tinggi
	Kualifikasi Pendidik PAUD Nonformal 70% Telah Dilatih	62	55	88,71%	Tinggi

No	Program Dan Indikator Kinerja Program	Target Renja 2013	Capaian 2013	Capaian Kinerja	Kategori
	Meningkatkan Presentase Guru Berkualifikasi S-1 88%	87	91,68	105,38%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Presentase Guru Berkualifikasi S-1 98%	91	93,49	102,74%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Guru Bersertifikat	67	98,4	146,87%	Sangat Tinggi
	Mempertahankan Rasio Pendidik dan peserta didik	1: 20	1: 16	125%	Sangat Tinggi
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			101,08%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Jumlah Sekolah Terakreditasi 95%	93	93,39	100,42%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan 90% SD dan SMP Terakreditasi Minimal B	86	88,93	103,41%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Jumlah SMA Berakreditasi B Sebesar 90%	82	88,16	107,51%	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Jumlah SMK Berakreditasi B Sebesar 90%	82	72	87,80%	Tinggi
	Meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan	80	85	106,25%	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah dari Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja urusan pendidikan yang terdiri dari 6 program memiliki rata-rata capaian kinerja yang sangat tinggi, hanya terdapat satu program yang memiliki rata-rata capaian kinerja yang tinggi. Beberapa program bahkan memiliki rata-rata capaian diatas 100% yaitu Program Pendidikan Menengah dengan skor capaian kinerja 107,43%; Program Pendidikan Non Formal dengan skor capaian kinerja 116,67%; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan skor capaian kinerja 106,76%; dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan skor capaian kinerja sebesar 101,08%. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun juga memiliki rata-rata capaian kinerja yang sangat tinggi dengan skor 98,01%. Satu-satunya program yang memiliki rata-rata capaian kinerja tinggi hanyalah Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan skor capaian kinerja 82,93%.

Dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), indikator yang memiliki capaian terendah yaitu 'Meningkatkan APK PAUD' dengan skor capaian 65,85% dan dikategorikan memiliki capaian Sedang. Indikator dengan capaian tertinggi yaitu 'Penerapan Sistem pembelajaran Berkarakter' dengan skor capaian 100%. Selanjutnya, pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sub program yang memiliki capaian kinerja terendah yaitu Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas SMP dengan skor capaian 40,74%, sedangkan sub program yang memiliki capaian kinerja tertinggi adalah Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas SD dengan skor capaian 161,43%.

Pada Program Pendidikan Menengah, sub program dengan capaian kinerja terendah adalah Mempertahankan APK SM dengan skor capaian kinerja sebesar 102,56%, sedangkan sub program yang memiliki capaian tertinggi ialah Meningkatkan APM SM (Sekolah Menengah) dengan skor capaian kinerja sebesar 112,05%. Pada Program Pendidikan Non Formal, sub

program Meningkatkan Lulusan Program Kecakapan Hidup Bersertifikat Kompetensi 20% dan Kecakapan Hidup Bagi Penduduk di Kelurahan/Desa memiliki capaian kinerja tertinggi dengan skor hingga 250%, sedangkan Meningkatkan Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Bersertifikasi merupakan sub program dengan capaian kinerja terendah yaitu 100%.

Berkaitan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, sub program dengan capaian kinerja terendah yaitu Presentase Guru SD/SDLB berkualifikasi S-I/D-4 dengan skor capaian kinerja 74,63% sedangkan sub program dengan capaian kinerja tertinggi yaitu Jumlah Guru SMK Bersertifikat, dengan skor capaian kinerja. Pada program yang terakhir, yaitu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, sub program Meningkatkan Jumlah SMK Berakreditasi B memiliki capaian kinerja terendah dengan skor kinerja 87,80% sedangkan sub program dengan capaian kinerja tertinggi yaitu Meningkatkan Jumlah SMA Berakreditasi B dengan skor capaian kinerja 107,51%.

Berdasarkan capaian rata rata indikator program pada urusan pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaran urusan pendidikan di Kota Semarang pada kurun waktu tahun 2013 telah berjalan dengan sangat baik.

5.2.2. Evaluasi Hasil Perencanaan Program Kegiatan

Evaluasi hasil perencanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013 dilakukan dengan menganalisis persentase capaian kinerja anggaran dimana tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki 495 kegiatan dengan 9 program. Secara keseluruhan Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan disajikan pada Tabel 1.2 berikut (yang isinya diringkas, karena sebagian besar tidak dapat diisi):

Tabel 5.6
Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

No	Program Dan Kegiatan	Rencana Dan Realisasi Tahun 2013			Kategori
		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Realisasi	Capaian Kinerja Anggaran	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.214.337.000	11.172.021.432	91%	Sangat Tinggi
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	293.708.000	222.579.869	76%	Tinggi
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	756.499.000	502.510.260	66%	Sedang
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan jasa administrasi keuangan	332.108.000	286.128.000	86%	Tinggi
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	50.000.000	49.160.000	98%	Sangat Tinggi
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.600.000	90.231.600	90%	Tinggi
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.000.000	60.887.110	97%	Sangat Tinggi

No	Program Dan Kegiatan	Rencana Dan Realisasi Tahun 2013			Kategori
		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Realisasi	Capaian Kinerja Anggaran	
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Pen- erangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.870.100	99%	Sangat Tinggi
8-60					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
3					
69					
70					
4					
71					
72					
73					

No	Program Dan Kegiatan	Rencana Dan Realisasi Tahun 2013			Kategori
		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Realisasi	Capaian Kinerja Anggaran	
74					
75					
5					
76					
77					
78					
79					
80-278					
6					
279-290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					

No	Program Dan Kegiatan	Rencana Dan Realisasi Tahun 2013			Kategori
		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Realisasi	Capaian Kinerja Anggaran	
297					
298					
299					
300-310					
400					
479					
480					
9					
481					
482					
483					
484					
485					
486					
487					

No	Program Dan Kegiatan	Rencana Dan Realisasi Tahun 2013			Kategori
		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Realisasi	Capaian Kinerja Anggaran	
488	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendidikan	215.246.000	195.633.500	91%	Sangat Tinggi
489	Sertifikasi ISO untuk Pelayanan Pendidikan	75.000.000	68.870.000	92%	Sangat Tinggi
490	Manajemen Pendataan Pendidikan	148.100.000	140.725.000	95%	Sangat Tinggi
491	Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat	125.000.000	122.780.000	98%	Sangat Tinggi
492	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	1.000.000.000	999.149.850	100%	Sangat Tinggi
493	Pengembangan Kepribadian	425.000.000	395.124.000	93%	Sangat Tinggi
494	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan	100.000.000	84.107.500	83%	Tinggi
495	Operasional pengelolaan Bantuan Pendidikan	35.000.000	34.288.900	98%	Sangat Tinggi
	Jumlah	277.250.798.000	130.466.710.057	47,05	Sangat Rendah

Sumber: Diolah dari Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015

Berdasarkan Tabel 5.6, diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang melaksanakan 9 Program dan 495 Kegiatan sepanjang tahun 2013. Secara umum, capaian kinerja anggaran Renja Dinas Pendidikan termasuk dalam kategori sangat rendah dengan skor capaian kinerja anggaran hanya 47,05%. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran pada Dinas Pendidikan pada tahun 2013 sangatlah rendah sehingga dana yang telah dianggarkan tidak terserap sepenuhnya.

Dari 495 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, terdapat 365 kegiatan atau 73,73% yang memiliki kategori sangat tinggi dan sebanyak 55 kegiatan atau 11,11% memiliki capaian dengan kategori yang tinggi. Kegiatan yang memiliki kategori sedang berjumlah 14 atau 2,82%. Sebanyak 9 kegiatan atau 1,81% memiliki kategori rendah dan sebanyak 52 kegiatan atau 10,50% memiliki capaian yang sangat rendah.

Dari 58 kegiatan yang terdapat di dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan yang memiliki capaian terendah yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 66% dan termasuk di dalam kategori sedang. Sedangkan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 2 kegiatan yang memiliki capaian terendah adalah Rehabilitasi Gedung UPTD Pendidikan Kec. Pedurungan dengan skor capaian kinerja anggaran 0% serta Rehabilitasi Gedung UPTD Pendidikan Kec. Gayamsari dengan skor capaian kinerja anggaran 2%, keduanya masuk di dalam kategori sangat rendah. Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang menuturkan bahwa dua kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena waktu yang diberikan tidak mencukupi, berikut penuturan staf Dinas Pendidikan

Kota Semarang tersebut:

“Itu sama dengan yang DID kasusnya, kita sudah berusaha perbaiki lewat Perubahan tapi waktunya terlalu mepet jadi tidak bisa terlaksana akhirnya”

Dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatan yang memiliki capaian kinerja terendah yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan skor capaian 77%, meski begitu kegiatan ini masih dikategorikan memiliki capaian kinerja yang tinggi.

Selanjutnya, dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini, kegiatan dengan capaian kinerja terendah ialah kegiatan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu yang memiliki capaian kinerja 0%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak dapat terealisasi sehingga capaian kinerja anggarannya termasuk di dalam kategori sangat rendah. Hal ini juga ditegaskan oleh salah seorang staf Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

“Kalau PAUD tahun 2013 itukan ada 5 kegiatan, hampir semua kegiatannya itu cukup bagus dengan capaian diatas 80% tapi ada satu kegiatan yang capaiannya 0% yaitu Pembangunan UGB PAUD Terpadu dan itu nilainya besar 600 juta Itu dana dari provinsi terus diambil karena waktu itu persiapan lahannya belum ada. Makanya dampaknya besar ketika dirata-rata jadi rendah capaian anggarannya” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Melalui pernyataan staf Dinas pendidikan Kota Semarang tersebut diketahui bahwa tidak terlaksananya Pembangunan UGB PAUD Terpadu karena lahan yang belum dipersiapkan membuat capaian kinerja Program ini menjadi

sangat rendah karena nominal kegiatan Pembangunan UGB PAUD Terpadu sangat besar yaitu Rp 600.000.000,-, sehingga ketika dirata-rata dengan kegiatan lainnya, program ini memiliki capaian kinerja yang sangat rendah.

Berkaitan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sebanyak 23 kegiatan dalam program ini memiliki capaian sangat rendah, dari kedua puluh tiga kegiatan tersebut terdapat 8 kegiatan yang memiliki capaian kinerja 0%, yang berarti kegiatan ini tidak terealisasi pada tahun 2013. Kedelapan kegiatan tersebut yaitu Kegiatan DAK SMP; Kegiatan DAK SD; Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 20; Fasilitas TPK Kurikulum dan Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP; Pembangunan Lab TIK SMPN 26; DAK Luncuran SD; DAK Luncuran SMP; dan Pengadaan Alat Lab IPA SMP Filial 20. Apa yang membuat capaian kinerja anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menjadi sangat rendah diterangkan oleh staf Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

“Penyebabnya sama dengan penjelasan di Program PAUD tadi, memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa berjalan dengan baik salah satunya DAK dengan banyaknya masalah, kemudian ada dana rehabilitasi yang sudah dianggarkan DID itu pelaksanaan juga tidak bisa karena ada beberapa permasalahan tentang juklak juknis penganggarannya, jadi tidak bisa berjalan dengan maksimal. Masalahnya di penganggarannya, jadi waktu itu belum lewat Dewan seperti ini, tapi kemudian sudah diperbaiki di Perubahan, tapi Perubahan waktunya mepet sehingga tidak bisa maksimal karena waktu pelaksanaannya kurang” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Sebagaimana dengan penjelasan pada program sebelumnya, tidak terlaksananya beberapa kegiatan dengan

anggaran yang besar di Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menjadikan capaian kinerja anggaran program ini sangat rendah. Beberapa kegiatan seperti DAK tidak dapat dilaksanakan karena mengalami berbagai permasalahan, kemudian kegiatan rehabilitasi juga mengalami permasalahan mengenai juklak dan juknis penganggarnya. Beberapa permasalahan tersebut sebenarnya telah berusaha dibenahi melalui APBD-P meski begitu waktu pelaksanaannya tidak mencukupi sehingga kegiatan yang tidak terlaksana berdampak pada rendahnya serapan anggaran dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pada Program Pendidikan Menengah terdapat 16 kegiatan yang memiliki capaian kinerja anggaran sangat rendah, tiga belas kegiatan diantaranya bahkan memiliki capaian kinerja 0% atau tidak terealisasi pada tahun 2013. Tiga belas kegiatan yang tidak terealisasi dalam Program Pendidikan Menengah yaitu Fasilitas Bussines Center SMK 2; Pengadaan Komputer SMA 13; Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA 1; Pembangunan RKB SMA 8; Pembangunan RKB SMK 2; DAK SMA; DAK SMK; Fasilitas Teaching Factory SMKN 5; Pembangunan RKB SMAN 13; Rehabilitasi Gedung SMAN 15; Pembangunan Ruang Perpustakaan SMAN 9; Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 13; dan Pembangunan RKB SMAN 15. Beberapa hal yang menyebabkan tidak terlaksananya 13 kegiatan dalam Program Pendidikan Menengah diterangkan oleh staf Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“Itu menggunakan bantuan keuangan Provinsi, itu berdasarkan pada Perubahan, pengambilan dana dari Provinsi di Perubahan sehingga ketika kita melaksanakannya waktunya tidak cukup karena kita tidak bisa membuat bangunan dalam jangka waktu 2 bulan 3 bulan untuk yang RKB. Kemudian ada juga yang rekeningnya itu tidak

sesuai. Saya contohkan misalnya Sanitasi di Juknisnya bilang itu pembangunan tapi nilai anggarannya 7 juta atau 5 juta itu tidak bisa untuk pembangunan kamar mandi, ini sebenarnya mau rehabilitasi atau membangun? Hal yang sama juga terjadi di kegiatan Fasilitas Bussines Center, ini sebenarnya untuk modal apa bantuan dalam bentuk jasa” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Sebagaimana kegiatan lain yang menggunakan bantuan keuangan provinsi dan direvisi melalui APBD-P, beberapa kegiatan dalam Program Pendidikan Menengah yang penganggarannya masuk dalam APBD-P juga tidak dapat terealisasi karena waktu yang dimiliki tidak mencukupi. Selain itu adanya rekening yang tidak sesuai juga membuat anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi.

Dalam Program Pendidikan Non Formal, terdapat 8 kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2013 dengan rincian 1 kegiatan memiliki kategori sangat tinggi, 2 kegiatan masuk dalam kategori tinggi, 1 kegiatan masuk dalam kategori sedang, 1 kegiatan termasuk dalam kategori rendah dan 3 kegiatan memiliki capaian kinerja sangat rendah. Kegiatan yang memiliki capaian tertinggi yaitu Fasilitas Akreditasi dan Penilaian Kinerja Lembaga PNFI dan Pembinaan Kursus Kelembagaan dengan skor capaian kinerja 95% sehingga masuk di dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan kegiatan yang memiliki capaian terendah dalam program ini yaitu Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C dengan skor capaian kinerja sebesar 21% sehingga termasuk dalam kategori capaian kinerja sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya dua sumber dana untuk kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C yang diterangkan oleh staf Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

“Paket A, B, C itu untuk semesteran ada dua sumber dana yaitu dari Provinsi dan dari APBD Kota. Yang dilaksanakan yang dari Kota, kalau yang dari Provinsi tidak bisa karena berkaitan dengan kebutuhan kegiatan yang biasanya diberikan dari dana hibah. Padahal Kejar Paket itu banyak yang tidak memenuhi syarat untuk menerima, misalnya setiap tahun mendaftar kan tidak boleh mereka setiap tahun dapat. Kedua berkaitan dengan akta notarisnya. Jadi misalnya tahun 2011 sudah dapat Kejar paket, 2012 dapat, 2013 dapat, begitu terus tidak boleh. Kemudian banyak yang belum punya akta notaris Kementerian Hukum dan HAM” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Dua sumber dana untuk Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C berasal dari Pemerintah Provinsi dan APBD Kota, namun yang digunakan hanyalah anggaran dari APBD Kota oleh sebab itu anggaran dari Pemprov tidak digunakan sebab merupakan dana hibah yang penggunaannya harus memenuhi syarat tertentu seperti harus akta notaris dari Kementerian Hukum dan HAM dimana banyak lembaga penyelenggara pendidikan Paket A, B, C yang belum memiliki akte notaris tersebut.

Berkaitan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdapat total 17 kegiatan yang diselenggarakan. Sepuluh kegiatan diantaranya memiliki capaian kinerja sangat tinggi, 2 kegiatan termasuk dalam kategori tinggi, 1 kegiatan memiliki capaian kinerja dengan kategori sedang, 1 kegiatan memiliki capaian kinerja dengan kategori rendah, dan 3 kegiatan memiliki capaian kinerja dengan kategori sangat rendah. Dalam program ini, kegiatan yang memiliki capaian kinerja tertinggi yaitu Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik; dan Pengembangan Profesi Pendidik Formal, keduanya memiliki skor capaian 100% dan masuk dalam

kategori capaian kinerja sangat tinggi. Kegiatan yang memiliki capaian kinerja terendah yaitu Fasilitasi Bantuan PTT Sekolah Swasta/Negeri, Departemen Agama dan Dinas Pendidikan dengan skor capaian kinerja 0% sehingga termasuk dalam kategori capaian kinerja sangat rendah. Tidak terealisasinya Fasilitasi Bantuan PTT Sekolah Swasta/Negeri, Departemen Agama dan Dinas Pendidikan diterangkan oleh staf Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

“Karena dulu tahun 2009 itu tetap masih berjalan, tapi setelah kita lihat lagi regulasi-regulasinya ternyata tidak diperbolehkan. Daripada nantinya ada apa-apa, akhirnya kita stop. Proses inipun kita sudah lewat komunikasi dengan Dirjen dan Kementerian dan sebagainya memang tidak diperbolehkan. Solusinya kita buat dalam bentuk kegiatan, kemudian kita beri uang transport”

Berdasarkan keterangan staf Dinas Pendidikan, adanya regulasi yang tidak memperbolehkan adanya PTT semenjak tahun 2005 membuat Dinas pendidikan memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan Fasilitasi Bantuan PTT Sekolah Swasta/Negeri, Departemen Agama dan Dinas Pendidikan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pencantuman kegiatan tersebut dalam Renja tahun 2013 didasari oleh adanya ketidaktahuan dari pihak Dinas Pendidikan akan adanya regulasi tersebut sehingga ketika mengetahui adanya regulasi yang tidak memperbolehkan PTT maka Dinas Pendidikan tidak merealisasikan kegiatan tersebut.

Pada program yang terakhir yaitu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdapat 15 kegiatan yang direncanakan. Sembilan program diantaranya memiliki capaian kinerja sangat tinggi, kegiatan yang memiliki capaian

kinerja tinggi hanya satu kegiatan, terdapat pula satu kegiatan yang memiliki capaian kinerja sedang, satu kegiatan memiliki capaian kinerja yang rendah, dan terdapat tiga kegiatan yang memiliki capaian kinerja sangat rendah. Kegiatan yang memiliki capaian kinerja tertinggi dalam program ini yaitu Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK dengan skor capaian kinerja 100%, sedangkan kegiatan yang memiliki capaian kinerja terendah yaitu Pelaksanaan Sosialisasi dan Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan dengan skor capaian kinerja sebesar 33% dan termasuk dalam kategori capaian kinerja yang sangat rendah.

Selanjutnya ringkasan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2013 disajikan pada Tabel 5.7 berikut ini:

Tabel 5.7
Evaluasi Program Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Keuangan (%)	Kategori
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.214.337.000	11.172.021.432	91,47	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.213.955.000	1.367.131.164	61,75	Rendah
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	274.626.000	237.284.950	86,40	Tinggi
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	825.000.000	196.001.500	23,76	Sangat Rendah
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	202.018.925.000	82.489.284.075	40,83	Sangat Rendah
6	Program Pendidikan Menengah	39.611.049.000	21.455.611.756	54,17	Rendah
7	Program Pendidikan Non Formal	781.532.000	582.482.450	74,53	Sedang
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.814.228.000	9.418.115.000	63,58	Rendah
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.499.146.000	3.548.777.730	78,88	Tinggi
Jumlah		277.250.798.000	130.466.710.057	47,05	Sangat Rendah

Sumber: Diolah dari Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015

Jika dicermati, Tabel 5.7 menunjukkan bahwa capaian kinerja kesembilan program yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2013 sangat rendah dengan skor capaian 47,05%. Dari kesembilan program tersebut, hanya terdapat 1 program atau 11,11% yang memiliki kategori capaian kinerja sangat tinggi. Sebanyak 2 program (22,22%) memiliki capaian kinerja yang tinggi. Hanya terdapat satu program (11,11%) yang memiliki capaian kinerja dengan kategori sedang. Tiga program lainnya (atau 33,33%) memiliki capaian kinerja yang rendah, sedangkan dua program (22,22%) memiliki capaian kinerja sangat rendah.

Dari kesembilan program tersebut, program yang memiliki capaian dengan kategori sangat tinggi yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selain itu, 2 program dengan kategori capaian yang tinggi yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan angka capaian kinerja sebesar 86,40% serta Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan skor capaian kinerja 78,88%. Program Pendidikan Non Formal masuk di dalam kategori capaian kinerja sedang dengan skor capaian kinerja 74,53%. Tiga program lainnya memiliki kinerja yang rendah, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja 61,75%, Program Pendidikan Menengah dengan capaian kinerja 54,17%, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan capaian kinerja 63,58%.

Berdasarkan evaluasi hasil perencanaan indikator makro dan evaluasi hasil perencanaan program kegiatan diketahui bahwa sepanjang tahun 2013, Dinas Pendidikan memiliki capaian kinerja program yang sangat baik, ditandai dengan capaian kinerja masing-masing program yang sangat

tinggi. Meski begitu, hal ini tidak diimbangi dengan capaian kinerja anggaran yang baik. Hasil evaluasi perencanaan program dan kegiatan justru menunjukkan bahwa capaian kinerja anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2013 hanya sebesar 47,05%. Berkaitan dengan hal tersebut, staf Dinas Pendidikan menerangkan bahwa:

“Contoh saja, APK itu kan berhubungan dengan daya tampung penerimaan peserta didik, minat sekolah, kemampuan masyarakat menyekolahkan anaknya dan lainnya. APK SMA berarti termasuk di dalam Program Pendidikan Menengah. Namun kegiatan yang berhubungan dengan APK ini banyak, tidak hanya kegiatan yang ada dalam Program Pendidikan Menengah, salah satunya ialah PPD yang termasuk dalam Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Jadi ada banyak kegiatan dari berbagai program yang ikut mendukung meningkatnya APK itu tadi, itu yang pertama. Kedua, pelaksanaan kegiatan itu tidak seluruhnya berhubungan dengan salah satu indikator kinerja program. Misalnya kegiatan lomba-lomba, jika kegiatan lomba-lomba itu tidak terealisasi apakah itu berhubungan dengan APK? Kan tidak, jadi walau ada kegiatan yang tidak berjalan, APK ini tetap tinggi. Oleh sebab itu (walaupun) capaian anggarannya tidak bagus tapi indikator kinerjanya bisa tetap tinggi. Ada beberapa program yang secara otomatis tidak perlu anggaran, program tersebut tetap jalan karena rutin” (Staf Dinas Pendidikan Kota Semarang, wawancara tanggal 24 Agustus 2015)

Melalui pernyataan tersebut, diketahui adanya dua hal yang menyebabkan tingginya capaian kinerja program yang tidak dibarengi dengan tingginya capaian kinerja anggaran. Pertama, adanya beberapa kegiatan lintas program yang mampu mendorong tingginya capaian kinerja program semisal APK SMA yang tidak hanya didukung oleh Program Pendidikan Menengah namun juga terdorong dengan pelaksanaan kegiatan dalam Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Kedua, tidak semua pelaksanaan kegiatan memiliki hubungan secara langsung dengan salah satu indikator kinerja program sehingga jika terdapat beberapa kegiatan yang mungkin tidak terlaksana sehingga menyebabkan serapan anggaran sangat rendah, hal tersebut tidak mempengaruhi tingginya capaian indikator kinerja tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dilakukan melalui telaah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja (Renja) serta rencana strategis (Renstra). Oleh karena itu dilakukan telaah sinkronisasi urusan, program, kegiatan, indikator, target capaian, serta dana program yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2013 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan tahun 2010-2015. Hasilnya adalah bahwa dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 telah menunjukkan adanya sinkronisasi urusan dengan dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan sehingga seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berfokus pada urusan wajib bidang pendidikan.

Secara umum dokumen Renstra Dinas Pendidikan dengan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 telah memiliki sinkronisasi dalam program yang direncanakan. Meski dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 terdapat 10 program, namun ada salah satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur hanya direncanakan untuk berlangsung hingga tahun 2011, artinya pada tahun 2013 Renstra Dinas Pendidikan juga memiliki 9 program yang sama dengan dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013.

Dari hasil perbandingan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dengan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 diketahui bahwa dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 terdapat 42 kegiatan pembangunan dari 6 program yang direncanakan. Analisis untuk sinkronisasi kegiatan Renja dan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013 hanya dapat dilakukan sebatas pada kegiatan pembangunan, karena tidak adanya keterangan di dalam dokumen Renstra mengenai kegiatan rutin yang direncanakan.

Perbedaan kegiatan yang ada dalam Renstra maupun Renja salah satunya dikarenakan penyusunan kegiatan Renstra yang dibuat secara global, tidak secara rinci menyebutkan satu persatu jenis kegiatan beserta lokasi kegiatan tersebut. Kegiatan dalam Renstra memang tidak disusun secara terperinci, karena dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Dinas Pendidikan. Alasan kedua atas ketidaksesuaian kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 dikarenakan pembuatan Renja harus mengacu pada RKPD Kota Semarang serta kebijakan Walikota Semarang sehingga terkadang ada beberapa kegiatan yang harus

ditambahkan dalam dokumen Renja meskipun kegiatan tersebut tidak direncanakan dalam Renstra.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat sinkronisasi kegiatan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2013 yang ditandai dengan adanya perbedaan jumlah maupun nama kegiatan yang direncanakan dalam Renstra maupun Renja Dinas Pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dokumen Renja dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang telah terdapat sinkronisasi urusan dan program, namun belum terdapat sinkronisasi kegiatan antara dua dokumen perencanaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan yang direncanakan di dalam Renstra namun tidak termuat dalam Renja, begitu pula sebaliknya.

Tentang Sinkronisasi Indikator Kinerja dan Target Capaian Program

Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, Dinas Pendidikan mestinya memiliki indikator kinerja serta target yang sama antara Renstra dengan Renja SKPD mengingat bahwa Renja merupakan penjabaran dari Renstra. Dari hasil membandingkan indikator kinerja dan target capaian program pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013, menunjukkan bahwa dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2013 tidak terdapat indikator kinerja pada masing-masing program serta target capaian masing-masing program tersebut.

Analisis dilakukan dengan dengan membandingkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan tahun 2013 sebagai pengganti Rencana Kerja Dinas Pendidikan. Meski dokumen LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013 telah mencantumkan indikator kinerja dan target capaian program, sangat disayangkan indikator kinerja dan target capaian tersebut tidak disusun berdasarkan program melainkan berdasarkan sasaran sehingga memiliki susunan yang berbeda dengan indikator kinerja dan target capaian program yang tercantum dalam Renstra, sehingga indikator kinerja dan target capaian kinerja ketiga program tersebut tidak dapat dibandingkan.

Juga terdapat beberapa program di Renstra yang pada kenyataannya memiliki indikator kinerja program yang tidak sama dengan indikator kinerja program dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 yang pelaksanaannya tercermin melalui LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013. Ada perbedaan indikator yang mencolok, misalnya pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan karena belum ada manajemen pelayanan pendidikan yang formatnya dari pusat. Perbedaan indikator kinerja program ini karena adanya perbedaan format perencanaan di tingkat Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Kementerian Pendidikan yang dulunya tidak memiliki Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Selain adanya perbedaaan indikator kinerja program dalam Resntra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013, juga ada perbedaan target capaian kinerja pada beberapa program dalam kedua dokumen perencanaan tersebut. Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator kinerja

program serta target capaian kinerja program Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 tidak memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja program serta target capaian kinerja program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2013 yang ditandai dengan adanya perbedaan indikator kinerja program dalam maupun adanya perbedaan target capaian kinerja program dalam indikator yang sama dari kedua dokumen perencanaan tersebut.

Terkait evaluasi Sinkronisasi Lokasi Program dan Kegiatan Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tidak dapat dilakukan sebab dalam dokumen Renstra, proyeksi perencanaan selama 5 tahun dibuat secara umum dan belum secara spesifik merujuk pada lokasi tertentu. Selain itu, kegiatan yang direncanakan dalam Renstra dibuat secara umum sehingga di dalam Renstra tidak tercantum lokasi program.

Prinsip perencanaan yang ideal tidak hanya menuntut adanya sinkronisasi urusan, program, kegiatan serta indikator kinerja dan target capaian kinerja program, namun juga mengharuskan adanya sinkronisasi anggaran bagi program yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 dan Renja Dinas Pendidikan tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pagu indikatif untuk kesembilan program dalam Renstra lebih banyak dibandingkan pagu indikatif yang direncanakan dalam Renja tahun 2013, karena Renja 2013 dibuat pada tahun 2012 sehingga menyesuaikan kondisi perolehan PAD maupun Bantuan Keuangan yang diterima, oleh sebab itu kedua dokumen perencanaan tersebut memiliki pagu indikatif yang berbeda.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2013 tidak terdapat sinkronisasi anggaran yang ditandai dengan adanya selisih pagu indikatif yang sangat besar dari program-program yang direncanakan dalam kedua dokumen perencanaan tersebut.

6.1.2. Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013 terdiri dari dua aspek evaluasi yaitu, (1) evaluasi hasil perencanaan indikator makro; dan (2) evaluasi hasil perencanaan program.

Evaluasi hasil perencanaan indikator makro yang merupakan evaluasi terhadap target dan realisasi capaian kinerja yang dilihat dari program dan indikator pada urusan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2013 yaitu urusan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja urusan pendidikan yang terdiri dari 6 program memiliki rata-rata capaian kinerja yang sangat tinggi, hanya terdapat satu program yang memiliki rata-rata capaian kinerja yang tinggi. Beberapa program bahkan memiliki rata-rata capaian di atas 100%. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Semarang pada kurun waktu tahun 2013 telah berjalan dengan sangat baik.

Berdasarkan evaluasi hasil perencanaan indikator makro dan evaluasi hasil perencanaan program kegiatan diketahui bahwa sepanjang tahun 2013, Dinas Pendidikan memiliki capaian kinerja program yang sangat baik, ditandai

dengan capaian kinerja masing-masing program yang sangat tinggi. Meski begitu, hal ini tidak diimbangi dengan capaian kinerja anggaran yang baik. Hasil evaluasi perencanaan program dan kegiatan justru menunjukkan bahwa capaian kinerja anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2013 hanya sebesar 47,05%.

Diketahui adanya dua hal yang menyebabkan tingginya capaian kinerja program yang tidak dibarengi dengan tingginya capaian kinerja anggaran yaitu adanya beberapa kegiatan lintas program yang mampu mendorong tingginya capaian kinerja program, dan karena tidak semua pelaksanaan kegiatan memiliki hubungan secara langsung dengan salah satu indikator kinerja program sehingga jika terdapat beberapa kegiatan yang mungkin tidak terlaksana sehingga menyebabkan serapan anggaran sangat rendah, hal tersebut tidak mempengaruhi tingginya capaian indikator kinerja tersebut.

Daftar indikator kinerja program dan target capaian program tahun 2013 yang berasal dari Renstra dan Renja Dinas Pendidikan pelaksanaannya tercermin melalui LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013, karena pada dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 tidak dicantumkan indikator kinerja program serta target capaian program. Meski dokumen LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013 telah mencantumkan indikator kinerja dan target capaian program, sangat disayangkan indikator kinerja dan target capaian tersebut tidak disusun berdasarkan program melainkan berdasarkan sasaran, sehingga memiliki susunan yang berbeda dengan indikator kinerja dan target capaian program yang tercantum dalam Renstra. Juga terdapat beberapa program di Renstra yang pada kenyataannya memiliki indikator kinerja program yang tidak sama dengan indikator kinerja program dalam

Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 yang pelaksanaannya tercermin melalui LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013

6.2. Saran

6.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Dalam dokumen Renja dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang telah terdapat sinkronisasi urusan dan program, namun belum terdapat sinkronisasi kegiatan antara dua dokumen perencanaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan yang direncanakan di dalam Renstra namun tidak termuat dalam Renja, begitu pula sebaliknya. Pelaksanaan di lapangan yang kadang tidak sesuai dengan perencanaan memang dapat terjadi, namun seharusnya tidak terdapat inkonsistensi yang banyak, karena akan menyebabkan ketidak teraturan administrative, yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan.

6.2.2. Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Evaluasi perencanaan indikator makro yang sudah baik perlu dipertahankan, sedangkan evaluasi hasil perencanaan program dan kegiatan yang masih menunjukkan serapan dana yang rendah perlu diperbaiki.

Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, Dinas Pendidikan mestinya memiliki indikator kinerja serta target yang sama antara Renstra dengan Renja SKPD mengingat bahwa Renja merupakan penjabaran dari Renstra.

Tabel 5.3 menunjukkan daftar indikator kinerja program dan target capaian program tahun 2013 yang berasal dari Renstra dan Renja Dinas Pendidikan yang digantikan oleh LAKIP karena pada dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 tidak dicantumkan indikator kinerja program serta target capain program. Meski dokumen LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013 telah mencantumkan indikator kinerja dan target capaian program, sangat disayangkan indikator kinerja dan target capaian tersebut tidak disusun berdasarkan program melainkan berdasarkan sasaran, sehingga memiliki susunan yang berbeda dengan indikator kinerja dan target capaian program yang tercantum dalam Renstra

Lebih jauh, Tabel 5.3 juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa program di Renstra yang pada kenyataannya memiliki indikator kinerja program yang tidak sama dengan indikator kinerja program dalam Renja Dinas Pendidikan tahun 2013 yang pelaksanaannya tercermin melalui LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2013

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Walter Steiss. 2003. *Strategic Management for Public and Non Profit Organizations*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Donald M. Norris and Nick L. Poulton. 2010. *A Guide to Planning for Change*. Michigan: The Society for College and University Planning (SCUP).
- Franco Archibugi. 2008. *Planning Theory: From the Political Debateto theMethodological Reconstruction*. Springer-Verlag. Roma, Italy
- John M. Bryson. 2004. *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations: A Guide To Strengthening And Sustaining Organizational Achievement*. California: John Wiley & Sons, Inc. San Francisco.
- Marios I. Katsioloudes. 2006. *Strategic Management: Global Cultural Perspectivesfor Profit andNon-Profit Organizations*. San Francisco: Elsevier Butterworth Heinemann Publications.
- Pemerintah Kota Semarang, 2010, *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang 2010-2015*

Pemerintah Kota Semarang, 2012, *Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang 2013*

Pemerintah Kota Semarang, 2014, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Semarang 2013*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

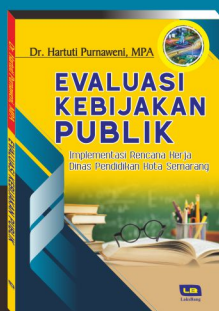
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Dr. Hartuti Purnaweni, MPA, lahir dan besar di Yogyakarta, adalah dosen pada Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro. Lulusan S1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional di FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1987), S2 di School of Public Administration, Queen's University, Canada (1993), dan S3 di Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2010).

Menterjemahkan buku *Politik dalam Sebuah Era Anti Politik* karya Geoff Mulgan (1994) yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Menulis beberapa buku ajar untuk mahasiswa Mata Kuliah Dasar Umum dan Administrasi Publik. Menulis bersama dengan kolega-koleganya dalam buku *Otonomi Daerah: Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal* diterbitkan oleh Puskodak, Undip (2005), *Analisis Kebijakan Publik* diterbitkan oleh Universitas Terbuka (2006, 2011), serta *Penguatan Governance dan Kelembagaan dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa*, diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan Undip (2014). Selain itu menulis berbagai artikel yang diterbitkan di jurnal dan prosiding nasional dan internasional, serta menjadi pembicara dan narasumber di berbagai kegiatan lokal, regional, nasional dan internasional.



Penerbit:
LaksBang PRESSindo Yogyakarta
member of Laksbang Group
<http://laksbangpressindo.com>
Email: laksbangk@yahoo.com

ILMU SOSIAL

18+



9 786025 452680

Harga di P. Jawa Rp 51.000,-